

# SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI II / MEI 2025

## KHUSUS

Senator Tak Pernah Lelah  
Perjuangkan Penguatan DPD RI

14

## NUSANTARA

Forum Senat ASEAN, Inisiatif  
Baru dari Sultan dan Hun Sen

18

## VARIA SENAT

Menjaga Hutan, Menjaga  
Identitas Papua Barat Daya

34

LOWONGAN  
KERJA

# PENGANGGURAN TERUS MENINGKAT

## WARISAN DAERAH

Badui: Melestarikan Tradisi  
di Tengah Arus Modernisasi

52



Akses  
MAJALAH SENATOR  
Versi Digital  
Dewan Daerah Republik Indonesia

# Ancaman PHK dan Kehadiran Negara

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri sepanjang 2025 menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Penutupan pabrik di sektor elektronik, sepatu, dan alat musik menunjukkan lemahnya daya saing dan rapuhnya ketahanan industri dalam negeri. Tidak kurang dari 7,28 juta orang kini menganggur, sebagaimana dilaporkan BPS. Ini bukan hanya angka, melainkan potret kegagalan kita menjaga keberlangsungan lapangan kerja yang layak.

DPD RI memandang situasi ini sebagai peringatan keras. Ketika industri besar meninggalkan Indonesia dan ribuan pekerja dirumahkan, maka yang paling terpuak adalah daerah. Tak hanya kehilangan pemasukan dan aktivitas ekonomi, daerah juga menanggung beban sosial akibat meningkatnya pengangguran. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas menjadi ketimpangan, urbanisasi tak terkendali, hingga meningkatnya potensi kriminalitas.

Sebagai representasi daerah, DPD RI mendorong pemerintah untuk segera merancang kebijakan penyelamatan industri padat karya dan berorientasi ekspor. Insentif fiskal, kemudahan logistik, dan perlindungan terhadap industri kecil dan menengah harus menjadi prioritas. Untuk sektor yang sangat terdampak, seperti media dan tekstil, negara perlu hadir dengan bantuan konkret seperti subsidi produksi, pendampingan digitali-

sasi, hingga insentif iklan bagi media lokal di daerah.

DPD RI juga mendorong penguatan program *reskilling* dan *upskilling* bagi korban PHK, agar mereka memiliki keterampilan baru dan siap masuk ke pasar kerja digital dan jasa. Pemerintah daerah bersama DPD RI dapat mengembangkan balai pelatihan kerja berbasis potensi lokal, seperti pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan begitu, pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya menjadi beban, tetapi bisa kembali produktif di sektor baru.

Selain itu, DPD RI mengusulkan agar pemerintah mempercepat penguatan sistem jaminan sosial, khususnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang saat ini belum maksimal menjangkau korban PHK di daerah. DPD RI juga akan mengawal pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi, serta memfasilitasi dialog antara dunia usaha dan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang.

PHK massal adalah sinyal bahwa kita membutuhkan arah baru dalam kebijakan ketenagakerjaan dan industri nasional. Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya kehilangan penghidupan. DPD RI siap menjadi jembatan aspirasi daerah dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan berpihak, agar Indonesia tak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh menghadapi krisis yang terus bergulir.  
(\* / Arso P Nugroho)

**SENATOR**   
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**PENASEHAT:** Mohammad Iqbal, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma  
**PEMIMPIN REDAKSI:** Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

## KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

# Termination Threat and The State's Presence

Termination (PHK) wave in diverse industrial sectors during 2025 turns into a real threat to social stability and national economy. Factory closings in electronic, shoemaking, and music equipment sectors have indicated a weak competitiveness and vulnerability within domestic industrial security. No less than 7.28 million people become unemployed in accordance with BPS report. It is not merely a figure, more so it portraits our failure to keep the sustainability of decent work fields.

DPD RI deems the situation as a critical warning. When major industries start abandoning Indonesia and thousands of workers get laid off, regions endure the most severe blow. Not only having to endure decline of income and economic activities, but regions also have to shoulder social burden due to the increase in unemployment. If not properly addressed, the impact could spread into social gap, uncontrolled urbanization, up to potentially increasing crime.

As region representative, DPD RI encourages the government to immediately design policy to safe labor-intensive industries which are export oriented. Tax incentives, logistic convenience, and protection for small medium enterprises should become a priority. For severely impacted sectors such as media and textile industries, the government must be present with real help such as pro-

duction subsidies, digitalization mentoring, up to advertising incentive for local media.

DPD RI also encourages the strengthening of re-skilling and up-skilling programs for layoff victims in order for them to possess new skills and be ready to enter digital and service labor market. Regional administration together with DPD RI may develop job training centers such as modern agriculture, tourism, and creative industries. Therefore, a layoff employee, instead of becoming a burden, can revert to productivity in a new sector.

Besides, DPD RI recommends that the government accelerates the strengthening of the social security system, particularly Losing Job Security (JKP) which currently hasn't optimally reached layoff victims in regions. DPD RI will also oversee the implementation of Labor Law in order to protect the rights of labors, as well as to facilitate dialog between the business world and the government to seek a long-term solution.

Mass layoff is a signal that we need to have new direction for labor policy and national industry. The state must not be absent when its people lose their livelihood. DPD RI remains steady to be the region's aspiration bridge in producing a more-leaning-toward-equity policy for Indonesia to not only grow but also be resilient against ongoing crisis.

(\* / Arso P Nugroho)

# PENGANGGURAN TERUS MENINGKAT

**Lonjakan angka pengangguran kembali membayangi Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang—bertambah sekitar 83 ribu dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang semakin berat di tengah ketidakpastian global.**

**Theresia Oktavina**

Penulis

**K**ondisi ini menjadi perhatian serius para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Salah satu kekhawatiran terbesar datang dari dampak kebijakan tarif impor *resiprokal* Amerika Serikat, yang diprediksi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tanah air. “Dampak langsung yang harus dihadapi oleh rakyat adalah ancaman PHK massal,” kata Al Hidayat Samsu, senator asal Sulawesi Selatan, mengutip data Celios yang memprediksi 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi kehilangan pekerjaan.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Industri tekstil menjadi salah satu sektor yang paling terpuak. PHK



Ribuan orang mengantre untuk melamar sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), di Balai Kota Jakarta, 23 April 2025. Jumlah yang melamar tembus 7.000 pelamar dan kuota yang tersedia hanya seribuan. (Foto CNBC Indonesia)

besar-besaran telah terjadi, seperti di PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut data Disnakertrans setempat, hingga awal tahun ini sebanyak 10.669 buruh tekstil telah kehilangan pekerjaannya. Masuknya produk impor, baik legal maupun ilegal, turut menekan industri dalam negeri hingga gulung tikar.

Ancaman gelombang PHK berikutnya bahkan sudah di depan mata. PT Sanken Indonesia akan menutup lini produksinya pada Juni 2025, disusul Yamaha Product Asia dan Yamaha Indonesia yang akan menutup operasional pada akhir tahun. Tak tanggung-tanggung, lebih dari dua ribu karyawan terancam kehilangan mata pencaharian. Pabrik sepatu Nike pun dilaporkan akan merumahkan seribu lebih pekerjanya.

Melihat ancaman yang terus membayangi rakyat,

DPD RI tidak tinggal diam. Melalui alat kelengkapan seperti Komite IV, para senator secara aktif menyuarakan persoalan ini dalam forum-forum resmi bersama kementerian dan lembaga terkait. Dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 8 Mei 2025, isu pengangguran menjadi salah satu sorotan utama.

Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah dorongan kuat agar pemerintah segera memperkuat strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan secara sistematis. “Kami terus berjuang agar persoalan ini menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional,” tegas Hidayat. DPD RI ingin memastikan, di tengah tantangan ekonomi global, rakyat tidak dibiarkan berjalan sendiri. (\*)

# DPD RI Desak Pemerintah Sediakan Lapangan Kerja yang Layak

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**M**eningkatnya angka pengangguran di Indonesia menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Melalui Komite III, DPD RI mengambil sikap tegas agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak sekadar menyusun rencana di atas kertas, melainkan memastikan program-program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kegelisahan rakyat terutama kaum muda yang masih kesulitan mencari kerja.

“Dokumen Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RT-KJP) memang patut diapresiasi. Namun kita ingin lebih dari sekadar rencana. Kita ingin solusi nyata yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan menjamin upah yang layak,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, saat memimpin rapat kerja dengan Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dalam rapat yang membahas Program Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 itu, Komite III juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak



Pimpinan dan anggota Komite IVDPD RI bersama Menaker Yassierli, usai penandatanganan kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang kerap terabaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan. “Negara harus hadir dan menjamin hak-hak mereka,” tegas Erni.

Menanggapi hal itu, Menaker Yassierli mengakui bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks. Ia berkomitmen untuk membenahi berbagai pekerjaan rumah, salah satunya dengan membangun *Labor Market Information System* (LMIS)—sebuah sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang mampu mendeteksi secara dini kebutuhan tenaga kerja, tren industri, serta sektor potensial yang bisa menyerap angkatan kerja.

“LMIS ini akan menjadi fondasi pengambilan kebijakan berbasis data, yang

menynergikan program antarkementerian dan lembaga. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja baru dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas Yassierli. Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan betul-betul menyasar kebutuhan pasar.

Sementara itu, Komite IV DPD RI dalam rapat kerja terpisah bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, pada hari yang sama, turut menyoroti pentingnya strategi terpadu untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu dari lima kesimpulan rapat itu menegaskan bahwa menciptakan pekerjaan bukan sekadar target statistik, melainkan bagian dari upaya menjaga martabat hidup rakyat Indonesia. (\*)

# Ekonomi Kreatif: Jalan Strategis Ciptakan Lapangan Kerja

M. Fathoni

Penulis

**D**i tengah tantangan pengangguran yang semakin kompleks, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis untuk membuka lapangan kerja. Komite III DPD RI menegaskan bahwa sektor ini bukan hanya penopang ekonomi nasional, tetapi juga instrumen penting untuk mengoptimalkan potensi lokal di berbagai daerah.

“Ekonomi kreatif dinilai mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah, asal didukung kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.”

*Filep Wamafma,  
Ketua Komite III DPD RI*

Pernyataan itu disampaikan Filep saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Gedung DPD RI, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Filep menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku ekonomi kreatif di daerah, mulai dari akses pembiayaan yang terbatas, fasilitas pelatihan yang minim, hingga lemahnya infrastruktur pendukung bagi para kreator.

Senator dari Papua Barat Daya, Hartono, menambahkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di daerah memerlukan konsolidasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, dan BUMN. Banyak wilayah di Indonesia yang sektor kreatifnya masih tertinggal dan membutuhkan intervensi konkret agar bisa ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky



Harsya menyambut baik dukungan Komite III DPD RI. Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif memiliki daya dorong besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan. “Kami ingin bekerja sama dengan DPD RI untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif di daerah, termasuk dalam hal regulasi, pengembangan SDM, dan penyediaan ruang kreatif,” ujarnya.

Teuku Riefky juga berharap peran aktif DPD RI dalam mendorong pemerintah daerah melakukan kajian serta menyusun kebijakan yang berpihak pada industri kreatif. “Dengan dukungan dari DPD RI, kami yakin ekonomi kreatif bisa menjadi solusi nyata mengatasi pengangguran dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (\*)

# Atasi Pengangguran dengan Memaksimalkan Potensi Daerah

Helena AF Ojan

Penulis

**S**enator DPD RI asal Bengkulu, Leni Haryati John Latief, menyuarakan keprihatinannya terhadap peningkatan angka pengangguran di daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,24 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi justru terjadi pada lulusan perguruan tinggi, yang meningkat hingga 3,47 persen poin.

“Angka pengangguran di Provinsi Bengkulu mencapai 36.992 orang dari total 1,14 juta angkatan kerja. Ini tantangan serius yang perlu penanganan sistematis dan kolaboratif,” tegas Leni, Kamis (8/5/2025).

Menurut Leni, masalah pengangguran tidak bisa ditanggulangi oleh satu pihak saja. Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, kementerian teknis, DPR RI, DPD RI, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Kolaborasi diperlukan dalam bentuk kebijakan, investasi, dan program yang tepat sasaran.

Salah satu solusi yang disampaikan adalah pengem-



Anggota DPD RI Leni Haryati John Latief. (Foto Istimewa)

“**Angka pengangguran di Provinsi Bengkulu mencapai 36.992 orang dari total 1,14 juta angkatan kerja. Ini tantangan serius yang perlu penanganan sistematis dan kolaboratif.**”

**Anggota DPD RI,  
Leni Haryati John  
Latief**

bangkan potensi daerah. Bengkulu memiliki kekuatan pada sektor agroindustri dan agrowisata yang belum tergarap maksimal. Impian untuk mendirikan pabrik kopi, sawit, dan karet sudah ada, namun terkendala oleh pembiayaan. “Ini butuh kerja sama lintas sektor agar

bisa terwujud dan menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Leni juga menyoroti langkah strategis yang sudah berjalan, seperti program ketahanan pangan dengan membuka Pembenuhan Jagung Bhayangkara Merah Putih di Kelopak, Kabupaten Kepahiang. Ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja.

“Ini yang pertama di Indonesia. Kita targetkan satu desa bisa tanam satu hektare jagung, lengkap dengan hilirisasinya. Kalau ini berhasil, bisa jadi solusi besar dalam mengatasi pengangguran,” tutup Leni dengan optimis. (\*)

Wawancara Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma:

# BLK Harus *Link and Match* dengan Kebutuhan Industri

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**K**etua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan pentingnya respon cepat terhadap tren peningkatan angka pengangguran di berbagai daerah, termasuk Papua Barat. Salah satu solusinya adalah memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Berikut penjelasan Filep dalam bentuk tanya jawab dengan media ini, Kamis (8/5/2025) :

## **Mengapa BLK perlu mengadopsi konsep *link and match*?**

Agar lulusan BLK relevan dengan kebutuhan industri, maka kurikulum dan pelatihan harus dikembangkan bersama pelaku industri. Jadi segalanya diatur sesuai kebutuhan industri, agar lulusan BLK memiliki kemampuan yang relevan.

## **Bagaimana kondisi pengangguran di Papua Barat saat ini?**

Berdasarkan

data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,21 persen, mengalami kenaikan dari Agustus 2024. Dari 431.276 penduduk usia kerja, terdapat 12.965 penganggur dari total angkatan kerja sebanyak 308.126 orang.

## **Apa langkah strategis yang ditawarkan untuk mengatasi pengangguran di Papua Barat?**

Kita harus mendorong penguatan BLK untuk menyiapkan SDM terampil dari kalangan orang asli Papua (OAP). Banyak perusahaan

swasta besar di Papua Barat yang seharusnya bisa mem-berdayakan tenaga kerja lokal, sehingga BLK perlu diarahkan sebagai penyedia SDM yang siap pakai dan tersertifikasi.

## **Apa peran BLK dalam menunjang pendidikan formal?**

BLK dapat melengkapi pendidikan vokasi yang ada di sekolah dan perguruan tinggi, terutama karena keterbatasan sarana praktik di lembaga pendidikan. Dengan begitu, BLK bisa menjadi tempat aktualisasi ilmu sekaligus meningkatkan kualitas lulusan pendidikan formal.

## **Apa yang harus diperhatikan agar lulusan BLK terserap di dunia kerja?**

Sertifikasi kompetensi harus diakui oleh industri, dan BLK harus menjalin kemitraan nyata dengan dunia usaha agar lulusan bisa magang atau langsung bekerja. Di sisi ini, diperlukan juga peran pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi antara BLK dan industri secara sinergis. (\*)



# Koperasi Merah Putih: Nafas Baru Ekonomi Desa

Betria Eriani

Penulis

**D**i tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah industri manufaktur, secercah harapan muncul dari desa. Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif berskala nasional, digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan kembali denyut ekonomi desa dan menjadi solusi nyata bagi para korban PHK yang selama ini menggantungkan hidupnya di kota. Bagi Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, inisiatif ini bukan hanya soal koperasi, tapi tentang mengembalikan martabat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Banyak yang di-PHK berasal dari desa dan merantau ke kota karena desa mereka tidak menyediakan lapangan kerja,” ujar LaNyalla. Kini, saat koperasi-koperasi mulai bermunculan di desa melalui program Merah Putih, LaNyalla melihat ini sebagai momentum penting untuk menggerakkan Gerakan Kembali ke Desa (GKD). Sebuah langkah yang dinilainya bukan sekadar strategi pemulihan ekonomi, tetapi juga rekonsiliasi antara warga desa dan tanah kelahiran mereka.

LaNyalla bukan orang baru dalam isu-isu strategis



Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Lanyalla Center)

pembangunan desa. Sebagai Ketua DPD RI ke-5, ia kerap menggaungkan pentingnya desa sebagai penyangga utama ketahanan nasional. “Jika desa kuat, negara ini kokoh. Kita tak bisa hanya mengandalkan kota,” tegasnya. Ia memandang Koperasi Merah Putih sebagai titik tolak yang bisa membangun pondasi ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan.

Didukung penuh oleh pemerintah pusat, koperasi ini bakal didanai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank-bank milik negara. Skema pendanaan ini memungkinkan koperasi tumbuh cepat, asalkan masyarakat desa dilibatkan aktif dalam kegiatan ekonominya. “Ini bukan hanya tugas Kementerian Koperasi. Harus melibatkan pertanian, perdagangan, UMKM, bahkan pariwisata,” tandas LaNyalla.

Namun, ia juga mewanti-wanti agar koperasi tidak hanya sekadar didirikan lalu dilupakan. Menurutnya, pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang konsisten sangat penting agar koperasi berjalan sehat dan memberikan dampak riil. “Tanpa itu, koperasi hanya akan jadi papan nama. Kita butuh gerakan ekonomi nyata, bukan formalitas,” katanya.

Koperasi Merah Putih sendiri merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Sebanyak 80 ribu koperasi akan berdiri di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Program ini akan diresmikan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional sebuah momentum besar untuk mengukuhkan kembali desa sebagai lokomotif ekonomi bangsa. (\*)

# Tarif Baru AS, Ancaman Nyata Bagi Buruh Indonesia

Lela Sadiyah

Penulis

**A**ncaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui industri dalam negeri. Kali ini, sumbernya datang dari luar negeri. Kebijakan terbaru Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor terhadap produk Indonesia seperti garmen, alas kaki, dan tekstil, dikawatirkan memberi pukulan telak bagi ekspor nasional. Senator Al Hidayat Samsu pun angkat suara, menyuarakan kegelisahan buruh yang kian meradang.

“Sebelum Hari Buruh Internasional, saya mendelegasikan langsung aspirasi dari serikat buruh di berbagai daerah. Mereka sangat khawatir kebijakan tarif ini akan memicu gelombang PHK besar-besaran,” ujar Al Hidayat. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Data dari *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) memperkirakan 1,2 juta pekerja berisiko kehilangan pekerjaan, dengan sektor tekstil sebagai yang paling terpukul.

Dari 1,2 juta pekerja yang terancam, lebih dari 191 ribu berada di sektor tekstil. Dampaknya pun berantai. Industri makanan, minuman, hingga para petani yang

memasok bahan baku ikut terkena imbasnya. Al Hidayat menyebut ini sebagai pukulan ganda: ekspor yang terhambat dan ancaman pengangguran yang membayangi. “Kita tak bisa lagi hanya pasrah pada arus global,” katanya.

Yang membuat situasi semakin muram, menurut Hidayat, adalah hasil negosiasi pemerintah dengan pihak AS yang belum menunjukkan kabar menggembirakan. Meski ada secerah harapan bahwa beberapa produk unggulan bisa mendapat tarif lebih kompetitif, kenyataannya tidak mudah membalikkan tangan. “Rakyat menanti hasil, bukan wacana,” tegasnya.

Bagi senator asal Sulawesi Selatan ini, langkah diplomasi yang hanya berujung pada kompromi tak lagi cukup. Ia mendorong pemerintah untuk mencari strategi yang lebih berani dan taktis guna mempertahankan kedaulatan ekonomi

nasional. “Jika terus bergantung pada pasar luar tanpa memperkuat dalam negeri, kita hanya menunggu giliran krisis,” katanya dengan nada prihatin.

Al Hidayat menyerukan perlunya kebijakan tangguh yang tak hanya melindungi industri, tapi juga menjaga hak hidup jutaan buruh Indonesia. “Bangsa ini tak boleh diam saat kebijakan luar negeri negara lain mengancam masa depan rakyatnya. Saatnya kita berdiri tegak dan menata ulang arah ekonomi nasional,” pungkasnya. Sebuah pernyataan yang menggetarkan nurani, dan layak jadi bahan refleksi bersama. (\*)



**Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# PHK di Industri Media, Demokrasi yang Terancam Senyap

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**G**elombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kini tak hanya mengguncang sektor manufaktur, tapi mulai merayap ke jantung demokrasi: industri pers. Fenomena ini membuat Senator DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, mengeluarkan peringatan keras. Bagi Gus Hilmy, krisis di dunia media bukan sekadar soal hilangnya pekerjaan, tapi juga potensi runtuhnya salah satu pilar utama demokrasi.

“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, ini alarm serius bagi demokrasi kita,” kata Gus Hilmy. Ia menekankan bahwa media adalah ruang publik yang menjaga suara independen tetap hidup. Ketika media melemah, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang jernih dan berkualitas, sebuah hak yang seharusnya dijaga oleh negara.

Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy mencermati bahwa tantangan industri pers tak hanya datang dari situasi ekonomi global yang belum pulih. Transformasi



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

digital yang bergerak begitu cepat juga membuat media, terutama yang berskala kecil dan menengah, kewalahan bertahan. “Namun harus diingat, media bukan sekadar entitas bisnis. Ia penopang demokrasi,” ujarnya tegas.

Menurutnya, kegagalan negara dalam merespons krisis ini bisa memicu kerusakan struktural dalam demokrasi Indonesia. Jika media dibiarkan tumbang, maka yang hilang bukan hanya perusahaan, tapi juga mekanisme kontrol sosial, edukasi publik, dan keberagaman suara. “Demokrasi tak bisa berjalan tanpa media yang kuat dan sehat,” lanjutnya.

Karena itu, Hilmy menyerukan agar pemerintah tidak tinggal diam.

Ia mendesak lahirnya kebijakan konkret berupa perlindungan dan insentif khusus bagi industri pers. Bentuknya bisa berupa keringanan pajak, subsidi iklan layanan masyarakat, atau dukungan untuk transformasi digital bagi media lokal dan komunitas.

“Negara harus hadir, tak hanya dengan belas kasihan, tapi dengan kebijakan strategis. Ini bukan hanya soal ekonomi media, tapi soal keberlangsungan informasi yang berimbang untuk rakyat,” kata Gus Hilmy, menutup pernyataannya. Di tengah riuhnya zaman digital dan tekanan ekonomi, suara seperti inilah yang menjaga nurani demokrasi tetap terjaga. (\*)

# Senator Tak Pernah Lelah Perjuangkan Penguatan DPD RI

**Di tengah hiruk-pikuk agenda nasional, suara senator terus bergema: DPD RI harus diperkuat. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar urusan kelembagaan, tetapi panggilan untuk memastikan daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia mendapat ruang yang adil dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan UUD 1945 menjadi salah satu pintu masuk penting untuk mewujudkan hal itu.**

**Rini Sumarni**

Penulis

**S**emangat itu kembali menyala saat Kelompok DPD RI di MPR RI menggelar diskusi publik bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Tangerang Selatan, awal Mei lalu. Forum ini menjadi ajang penggalangan dukungan untuk penguatan posisi DPD RI dalam konstelasi kekuasaan nasional.

Diskusi tersebut menghadirkan tokoh-tokoh penting, seperti pakar hukum tata negara Margarito Kamis, akademisi politik Syamsuddin Haris, guru besar hukum Juanda, pakar hukum Valentina Sagala,



Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR bersama pakar diskusi publik bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (5/5/2025). (Foto MPR RI)

dan Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Aji Padindang. Dari forum ini, muncul satu benang merah: saatnya DPD RI diberi kewenangan lebih luas agar bisa benar-benar menjadi wakil daerah yang kuat.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Dedi Iskandar Batubara, menyebut bahwa keinginan untuk mengubah UUD 1945 bukan semata-mata aspirasi senator, melainkan juga harapan dari masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang sehat, tak boleh ada lembaga negara yang terus-menerus dipinggirkan. DPD RI, menurutnya, harus bisa sejajar secara fungsional dengan DPR RI, terutama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain mendorong perubahan konstitusi, para sena-

tor juga bergerak di jalur regulasi. Saat ini, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) tengah menyiapkan RUU DPD RI yang akan mengatur lebih tegas tugas, fungsi, dan kedudukan DPD dalam struktur kenegaraan. RUU ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang kuat bagi peran DPD RI ke depan.

Yang menarik, perjuangan ini bukan milik segelintir senator. Dari Sumatera Utara, Maluku, Jawa Timur, hingga Papua Tengah—semua kompak menyuarakan penguatan DPD RI. Ini bukan sekadar simbol keterwakilan daerah, tapi cermin semangat kolektif untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dengan suara yang setara di pusat. Para senator mungkin tak selalu disorot, tapi mereka tak pernah lelah memperjuangkan suara daerah. (\*)

# 2026: Jalan Terang Penguatan DPD RI

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**A**ngin segar mulai berembus dari ruang-ruang parlemen.

Harapan akan penguatan peran dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kini bukan lagi sekadar wacana. Para senator, khususnya yang tergabung dalam Kelompok DPD RI di MPR RI, sedang menyiapkan langkah besar: mendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2026. Tujuannya jelas menegaskan eksistensi DPD RI sebagai representasi sejati daerah dalam sistem presidensial kita.

“Bukan hanya DPD RI yang menginginkan ini. Banyak kalangan, termasuk masyarakat sipil, sudah lama menyuarakan pentingnya penataan ulang lembaga negara,” ujar Dedi Iskandar Batubara, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, saat menjadi tuan rumah diskusi publik bertema “Eksistensi DPD RI dan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Banten, Senin (5/5/2025). Suara-suara dari diskusi ini seakan menggema lebih kuat: DPD RI butuh ruang gerak yang lebih luas.

Dedi, senator asal Sumatera Utara, melihat tahun 2025 ini



Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sebagai titik balik. Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran membuka sinyal positif terhadap penataan kelembagaan negara. Salah satu buktinya, Rancangan Undang-Undang tentang DPD RI resmi masuk dalam daftar prioritas Prolegnas. Sebuah langkah maju yang kini tengah digodok serius oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

“RUU ini sangat penting, karena akan jadi pintu masuk untuk memperkuat tugas dan fungsi DPD RI,” jelas Dedi. Tak hanya sekadar membahas draf, PPUU DPD RI juga sedang menyiapkan naskah akademik yang solid. Harapannya, RUU ini tak hanya menjadi simbol perjuangan, tapi benar-benar menjadi alat perjuangan yang efektif bagi daerah.

Menariknya, pemerintah kini memberi ruang kolabo-

rasi yang lebih terbuka kepada DPD RI. Walau tak sama persis seperti DPR, sinergi yang dibangun mulai terasa nyata. Senator pun optimis, ini momen penting yang tak boleh disia-siakan. “Kesadaran kolektif bangsa ini perlu dibangkitkan. DPD RI seharusnya punya kewenangan yang seimbang dengan DPR RI,” tegas Dedi.

Ia juga mencermati sejumlah isu krusial yang berpotensi ikut dibahas dalam perubahan UUD, seperti revisi UU Pemilu dan mekanisme Pilkada. “Kalau momentumnya pas, kenapa tidak sekalian kita tata ulang sistem ketatanegaraan kita?” ucapnya mantap. Perubahan bukan hal yang mudah, tapi dengan semangat kolektif dan dukungan publik, penguatan DPD RI kini bukan lagi mimpi, tapi harapan yang mulai menjelma nyata. (\*)

# Penguatan DPD RI untuk Suarakan Kepentingan Daerah

Nanda Russia Rola

Penulis

**D**i tengah dinamika politik nasional, suara senator dari Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto, kembali menggaung: DPD RI harus diperkuat! Sebagai Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR RI, Abraham menegaskan bahwa penguatan kewenangan DPD adalah kebutuhan mendesak agar aspirasi daerah benar-benar sampai ke pusat kekuasaan. DPD bukan sekadar pelengkap ia adalah representasi sah dari seluruh daerah di Indonesia.

“Penguatan kewenangan DPD RI bisa ditempuh melalui perubahan UUD 1945,” kata Abraham dalam diskusi publik bertema “Eksistensi DPD RI dan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, awal Mei lalu. Menurutnya, sistem presidensial yang kita anut sekarang perlu dikaji ulang agar seluruh lembaga, termasuk DPD RI, mendapat ruang kerja yang proporsional dan berdaya guna.

Tak hanya lewat jalur amandemen, Abraham juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang DPD RI. Ia



Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

percaya, lewat regulasi khusus ini, posisi dan fungsi DPD bisa ditegaskan lebih kuat. “Saya terus menyuarakan kepentingan daerah sekaligus memperjuangkan penguatan kewenangan DPD,” ujarnya penuh semangat.

Abraham juga mengajak seluruh senator untuk tak tinggal diam. Menurutnya, sudah saatnya DPD RI bersatu menyuarakan penataan ulang sistem presidensial, sekaligus memperkuat keberadaan DPD dalam tata kelola negara. Perjuangan ini bukan soal jabatan, melainkan tentang membela suara rakyat dari berbagai pelosok Tanah Air.

Untuk mendukung gerakan ini, Kelompok DPD RI di MPR RI tengah menyiapkan buku saku bagi seluruh senator. Buku ini akan men-

jadi pegangan saat mereka turun ke daerah pemilihan. Isinya antara lain menjelaskan posisi konstitusional DPD, fungsi strategisnya, serta agenda besar yang terus diperjuangkan sehingga masyarakat bisa lebih memahami pentingnya peran DPD RI.

Tak kalah penting, Abraham juga menyinggung keberlanjutan agenda Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang pernah direkomendasikan MPR periode sebelumnya. Hingga kini, masih terbuka opsi apakah PPHN akan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau melalui amandemen konstitusi. Yang pasti, DPD RI siap terlibat aktif dalam setiap pembahasan yang menyangkut arah dan masa depan bangsa. (\*)

# Penguatan Kewenangan DPD RI Bukan Gagasan Ambisius Institusi



Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR bertema “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945”. (Foto/dok Pribadi)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**I**su penguatan kewenangan DPD RI kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR RI bertema “Eksistensi DPD RI dan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” yang digelar di Serpong, Banten, Senin (5/5/2025). Kali ini, Senator Jawa Timur Lia Istifhama tampil dengan pandangan tajam mengenai arah reformasi ketatanegaraan dan posisi strategis DPD RI dalam sistem presidensial Indonesia.

Menurut Lia, penguatan fungsi DPD RI bukan sekadar obsesi kelembagaan.

Ia menegaskan, gagasan itu harus dipahami sebagai langkah konstitusional untuk memperkuat keberlangsungan demokrasi Indonesia. “Setiap perubahan kelembagaan harus dibangun dengan narasi yang kuat dan terbuka, bukan sekadar dilihat sebagai ambisi institusi,” tegasnya.

Lia mengingatkan bahwa DPD RI merupakan representasi murni rakyat tanpa afiliasi partai politik. Dengan legitimasi itu, wajar jika DPD RI mendorong sistem bikameral yang lebih kuat dan seimbang dalam struktur presidensial. “Justru karena tidak terikat partai, DPD lebih mampu menyuarakan aspirasi rakyat secara langsung,” tambahnya.

Namun, ia juga me-

nyoroti tantangan utama yang dihadapi DPD RI, yaitu rendahnya popularitas di tengah masyarakat yang cenderung pragmatis. Meski dipilih melalui pemilu, keberadaan DPD belum sepenuhnya dimaknai publik sebagai lembaga strategis. Salah satu penyebabnya, kata Lia, adalah minimnya kewenangan DPD dalam proses legislasi dan penganggaran.

Dalam konteks ini, ia menilai penting adanya penguatan formal dan fungsional bagi DPD RI agar mampu menjalankan fungsi *check and balance* secara efektif. Lebih jauh, gagasan itu juga harus dikaitkan dengan semangat desentralisasi yang adil dan efisien. “Daerah tidak bisa terus bergantung pada pusat. DPD hadir untuk menjembatani itu,” ujarnya.

Lia pun menyampaikan bahwa amendemen kelima UUD 1945 bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem presidensial melalui peran DPD RI yang lebih proporsional dalam sistem dua kamar. “Ini bukan soal ambisi, tapi tentang penyempurnaan sistem ketatanegaraan agar benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dari seluruh penjuru negeri,” tutupnya. (\*)

# Efektif Perjuangkan Daerah, DPD RI Harus Ditata Ulang

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**S**enator Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menegaskan pentingnya penataan ulang kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar lebih efektif memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya, DPD RI perlu diperkuat melalui regulasi baru yang tegas dan sesuai amanah konstitusi, agar tidak sekadar menjadi simbol politik tanpa daya dorong.

“DPD RI harus memiliki regulasi yang lebih kuat agar mandat konstitusionalnya sebagai representasi daerah dapat dijalankan secara optimal,” ujar Teras Narang dalam rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bersama pimpinan alat kelengkapan DPD RI lainnya. Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.

Dalam forum itu, Teras menekankan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tugas dan fungsi DPD RI secara lebih jelas. Selama ini, posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan masih belum sekuat yang diharapkan, baik dalam fungsi legislasi mau-



Anggota DPD RI Agustin Terang Narang bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama senator lainnya di sela-sela rapat gabungan PPUU DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**DPD RI harus memiliki regulasi yang lebih kuat agar mandat konstitusionalnya sebagai representasi daerah dapat dijalankan secara optimal.**”

**Anggota DPD RI,  
Agustin Teras Narang**

pun pengawasan anggaran. Ia menilai, inilah saatnya DPD RI diberi peran yang lebih signifikan.

Teras berpandangan bahwa penataan internal juga menjadi kunci penguatan peran DPD RI. Dengan struktur yang lebih tertata dan aturan main yang lebih jelas, DPD bisa bertransformasi menjadi lembaga yang benar-benar memperjuang-

kan kepentingan daerah secara substansial, bukan hanya seremonial.

Ia menambahkan, undang-undang yang mengatur secara khusus tentang DPD RI bukan hanya soal legitimasi, tetapi juga menyangkut efektivitas kerja di lapangan. Dengan payung hukum yang memadai, DPD RI akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen di tingkat pusat.

Namun, Teras juga menegaskan bahwa proses ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antaranggota DPD RI serta dukungan luas dari masyarakat daerah agar perjuangan legislasi ini bisa terealisasi. “Tanpa dukungan rakyat, kekuatan politik DPD RI akan tetap terbatas,” pungkasnya. (\*)

# Penguatan Peran DPD RI, Kebutuhan Mendesak Masyarakat Daerah

Lela Sadiyah

Penulis

**W**akil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Sewitri, menegaskan bahwa penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam proses legislasi bukan semata-mata agenda kelembagaan, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat daerah yang menginginkan regulasi lebih inklusif dan berpihak.

“Kami ingin DPD RI benar-benar menjadi rumah besar bagi daerah, tempat suara mereka didengar dan diperjuangkan dalam pembentukan undang-undang,” ujar senator asal Riau itu dalam Rapat Pleno PPUU, akhir April 2025 lalu. Rapat tersebut membahas penetapan program kerja dan jadwal kegiatan PPUU ke depan.

Menurut Sewitri, penguatan DPD RI dalam proses legislasi adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus bentuk akuntabilitas terhadap rakyat yang memilih langsung anggota DPD RI. Salah satu fokus utama saat ini adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DPD RI, yang masuk dalam prioritas



Anggota DPD RI Sewitri. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kami ingin DPD RI benar-benar menjadi rumah besar bagi daerah, tempat suara mereka didengar dan diperjuangkan dalam pembentukan undang-undang.**”

Wakil Ketua PPUU  
DPD RI,  
Sewitri

legislasi nasional.

RUU tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperjelas fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerja DPD RI di tengah sistem ketatanegaraan yang selama ini masih memberi porsi terbatas pada peran DPD. “Kami tidak ingin DPD RI hanya menjadi lembaga pemberi pertimbangan,

tapi juga inisiator aktif dalam pembentukan regulasi,” ujarnya.

Dalam rapat itu juga dibahas strategi untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih atau bahkan kontraproduktif dengan kepentingan daerah.

Sewitri menilai, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah sering kali lemah, dan inilah yang harus dijembatani oleh DPD RI.

Ia pun berharap, penguatan peran DPD RI ke depan akan semakin konkret dengan dukungan politik dan publik yang lebih luas. “Kalau regulasinya sinkron dan berpihak, masyarakat di daerah akan merasakan langsung dampaknya. Itulah yang kami perjuangkan,” pungkasnya. (\*)

# Forum Senat ASEAN, Inisiatif Baru dari Sultan dan Hun Sen

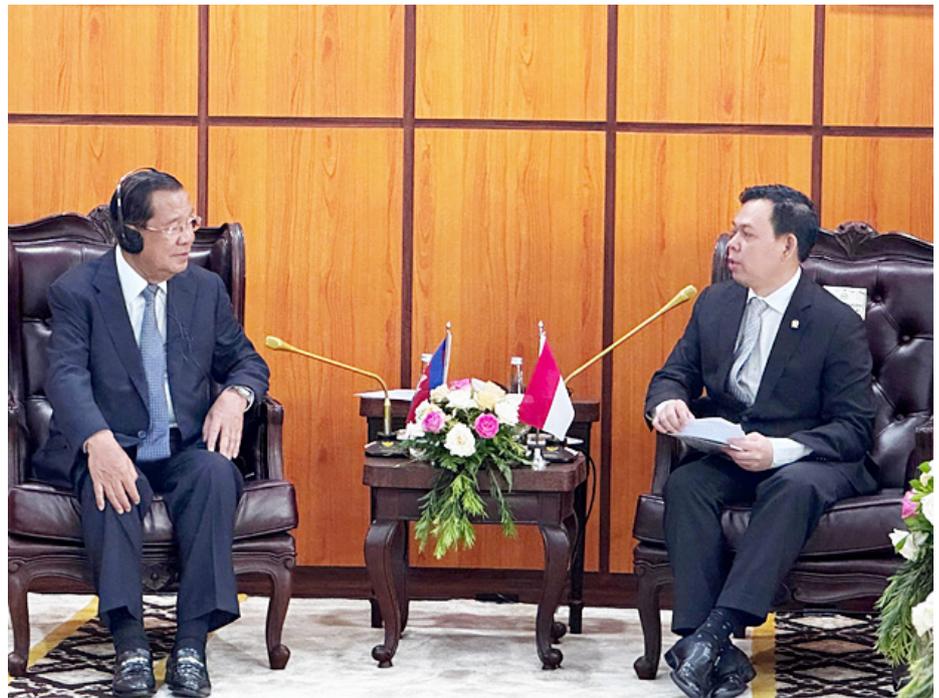
Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**L**angkah penting menuju diplomasi parlemen regional digagas dalam pertemuan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan Presiden Senat Kamboja, Samdech Techo Hun Sen, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Kedua tokoh ini sepakat membentuk Forum Senat ASEAN, sebuah wadah kerja sama antar-lembaga senat di Asia Tenggara.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik, forum ini diharapkan menjadi kanal penting bagi kerja sama multilateral antarnegara ASEAN yang memiliki lembaga senat. “Kami bersepakat untuk membentuk Forum Senat ASEAN ini. DPD RI tentu sangat berkepentingan untuk ikut berperan aktif di dalamnya,” ujar Sultan kepada pers usai pertemuan.

Selama ini, belum ada wadah resmi yang mempertemukan lima negara ASEAN yang memiliki lembaga senat, yakni Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Padahal, senat



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin sedang melakukan pembicaraan dengan Presiden Senat Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

di kelima negara ini memiliki peran strategis dalam menopang fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintahan masing-masing.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Sultan dan Hun Sen akan segera menginisiasi komunikasi langsung dengan pimpinan senat dari tiga negara lainnya. Diharapkan, Forum Senat ASEAN bisa segera diformalkan dan menjadi ajang konferensi tetap antarnegara anggota dalam waktu dekat.

Pertemuan bilateral itu juga dimanfaatkan untuk membahas isu ketenagakerjaan, terutama mengenai keberadaan tenaga

kerja Indonesia (TKI) di Kamboja yang terus meningkat. Sultan menyampaikan langsung harapan agar pemerintah Kamboja memberikan perhatian dan perlindungan yang layak kepada WNI yang bekerja di sana.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, serta sejumlah pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI. Inisiatif membentuk Forum Senat ASEAN dinilai menjadi langkah diplomatik baru yang menegaskan posisi DPD RI dalam tatanan parlemen regional. (\*)

# Forum Senat ASEAN Perkuat Diplomasi Daerah

Arso P Nugroho

Penulis

**B**adan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah mendorong pembentukan Forum Senat ASEAN sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran daerah dalam diplomasi kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini dianggap sangat penting dalam menjaga stabilitas geopolitik, memperluas kerja sama ekonomi, serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN.

Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menyampaikan dalam Rapat Kerja bersama Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto Reza Suryodipuro, bahwa forum ini akan menjadi wadah resmi bagi senator dari negara-negara dengan sistem bikameral untuk berdialog dan berkoordinasi. “Ini akan memperkuat keterlibatan daerah dalam membentuk arah kebijakan ASEAN ke depan,” ujarnya.

Gusti Farid menambahkan, peran DPD RI sangat vital mengingat integrasi ASEAN yang semakin dalam, tidak hanya di bidang politik dan keamanan, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial-budaya. Berbagai isu seperti ketahanan pangan, perubahan iklim,



Pimpinan dan anggota BKSP DPD RI bersama Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Reza Suryodipuro, usai menggelar rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Ini akan memperkuat keterlibatan daerah dalam membentuk arah kebijakan ASEAN ke depan.**”

**Ketua BKSP DPD RI,  
Gusti Farid Hasan  
Aman**

konektivitas fisik dan digital, serta pengembangan sumber daya manusia, memiliki dimensi daerah yang tidak bisa diabaikan.

Wakil Ketua BKSP DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menilai bahwa hubungan yang lebih erat antar-senator di ASEAN akan memperkuat posisi kawasan dalam menghadapi tantangan geopolitik

dan ekonomi. “Pelibatan DPD RI juga penting karena anggota kami mewakili seluruh provinsi, termasuk wilayah perbatasan yang strategis,” kata Mirah.

Senator Muhammad Nuh dari Sumatera Utara turut mendukung inisiatif ini. Menurutnya, Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN memiliki posisi sentral yang harus dioptimalkan. “BKSP harus proaktif membangun forum ini agar kita dapat mengambil langkah-langkah strategis demi kepentingan bangsa,” ujarnya.

Dengan terbentuknya Forum Senat ASEAN, DPD RI berharap suara daerah dapat lebih diperhitungkan dalam diplomasi kawasan, sehingga membangun komunitas ASEAN yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. (\*)

# Pengusaha Muslimah Harus Siap Bersaing Secara Global

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menerima kunjungan rombongan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kalimantan Barat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, IPEMI Kalbar menyampaikan harapan agar terjalin sinergi lebih kuat antara DPD RI dan organisasi kewirausahaan perempuan di daerah.

GKR Hemas memberikan apresiasi tinggi terhadap peran aktif perempuan pengusaha, khususnya pengusaha muslimah, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja dan agen perubahan sosial di masyarakat.

“Perempuan memiliki potensi besar untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang berdampak nyata. Saya mendorong agar perempuan Indonesia, khususnya pengusaha muslimah, terus mengembangkan diri, memperluas jejaring, dan menjadi motor penggerak kemajuan di lingkungannya,” ujar GKR Hemas.

Ia juga mengingatkan



Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat menerima kunjungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kalimantan Barat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Perempuan memiliki potensi besar untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang berdampak nyata. Saya mendorong agar perempuan Indonesia, khususnya pengusaha muslimah, terus mengembangkan diri, memperluas jejaring, dan menjadi motor penggerak kemajuan di lingkungannya.**”

**Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas**

bahwa dunia usaha kini menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Contohnya, kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika

Serikat Donald Trump, yang berdampak pada rantai pasok global dan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

“Pelaku usaha tidak boleh hanya fokus pada pasar lokal. Kita harus adaptif terhadap perubahan kebijakan internasional dan siap bersaing secara global. Penting bagi kita untuk mampu membaca tren ekonomi dunia dan mengambil peluang yang ada,” tegas senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Menanggapi aspirasi IPEMI Kalimantan Barat, GKR Hemas menegaskan komitmen DPD RI untuk terus memperjuangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Khususnya, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh daerah Indonesia. (\*)

# Persatuan Sipil dan Militer: Pilar Utama Kemajuan Bangsa

Helena AF Ojan

Penulis

**D**alam suasana hangat halal bihalal Keluarga Besar Alumni dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) yang digelar di Jakarta, Minggu (11/5/2025), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menyampaikan pesan penting tentang peran persatuan sipil dan militer dalam membangun masa depan Indonesia. Menurutnya, sinergi antara dua elemen ini merupakan kunci agar bangsa dapat berdiri sejajar di panggung global dan mengukir kemajuan yang berkelanjutan.

Tamsil mengingatkan bahwa sejarah dunia telah banyak mencatat betapa mahalnya harga yang harus dibayar suatu negara ketika terjadi keretakan antara sipil dan militer. Konflik semacam itu sering berujung pada ketidakstabilan yang merugikan masyarakat luas. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif di Indonesia, agar kolaborasi antara sipil dan militer tetap terjaga sebagai pondasi yang kokoh untuk pembangunan nasional.

“Persatuan sipil dan militer adalah fondasi untuk mengelola potensi besar bangsa Indonesia. Sinergi ini memungkinkan kita bukan hanya untuk sejajar dengan negara-negara maju, tetapi



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung usai menghadiri halal bihalal Keluarga Besar Alumni dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) di Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

juga memperkuat pengaruh Indonesia di forum internasional seperti BRICS demi memperjuangkan kepentingan umat dan keadilan global,” tegas Tamsil. Ia menambahkan, kolaborasi ini harus diwujudkan melalui dialog lintas sektor, pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan strategis, serta penguatan peran militer sebagai penjaga stabilitas nasional.

Lebih jauh, Tamsil memuji visi Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai peta jalan strategis menuju masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan beradab. Ia menilai, Asta Cita bukan sekadar slogan politik, melainkan sebuah kerangka besar yang menuntut kepemimpinan visioner dengan keberanian moral untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Program-program nyata seperti pelatihan vokasi nasional, penyediaan makanan bergizi gratis, dan industrialisasi berbasis sumber daya lokal menjadi bukti komitmen kuat dalam mewujudkan

cita-cita tersebut.

Asta Cita, menurut Tamsil, juga mencerminkan konsep ideal “*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*,” sebuah masyarakat sejahtera yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul secara moral dan sosial. Melalui integrasi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberadaban, bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Di akhir sambutannya, Tamsil mengajak para alumni HMI dan seluruh kader untuk mengambil peran aktif menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi besar ini. Ia menegaskan pentingnya kontribusi intelektual dan aksi nyata yang berkelanjutan, membangun ekosistem kolaboratif lintas sektor mulai dari pendidikan hingga industri. Dengan demikian, Asta Cita tidak sekadar menjadi impian, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (\*)

# Ketua DPD RI Optimis Ekonomi Nasional Segera Bangkit

M. Fathoni

Penulis

**M**eskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,87 persen, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, tetap optimis ekonomi nasional akan segera *rebound* dan mengalami pemulihan yang kuat sebelum akhir tahun ini. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi Sultan, Selasa (6/5/2025), yang juga merupakan mantan Wakil Gubernur Bengkulu.

Sultan menilai perlambatan yang terjadi merupakan fenomena yang wajar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan dunia saat ini. Ia menyoroti sejumlah

faktor eksternal, seperti kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih berhati-hati dan efisien. Namun, ia menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan siap menghadapi tantangan tersebut.

Menurut senator asal Bengkulu ini, pemerintah telah menjalankan strategi yang tepat dengan fokus pada peningkatan produktivitas pangan dan pengembangan investasi di sektor riil. Hal ini terbukti dengan tercapainya target swasembada beras yang menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan pangan nasional. Meski demikian, Sultan mengingatkan agar pemerintah terus berinovasi dalam memperluas peluang investasi serta meningkatkan belanja pemerintah untuk memperkuat pasar domestik dan ekspor.

“Kebijakan ekonomi pemerintah saat ini sudah berada

pada jalur yang benar untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Sultan juga menyoroti potensi *windfall* devisa yang bisa diperoleh dari komoditas strategis Indonesia, mengingat permintaan global terhadap produk pangan dan perkebunan terus mengalami peningkatan.

Lebih jauh, Sultan B Najamudin memandang program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah luar kota. Ia yakin inisiatif ini mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal secara signifikan.

Dengan keyakinan yang kuat, Sultan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah agar momentum pemulihan ekonomi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan kembali positif dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia,” tutupnya optimis. (\*)



**Ketua DPD RI Sultan B Najamudin**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos? Anggota DPD DIY Angkat Bicara

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**W**acana kontroversial muncul ketika Gubernur Jawa Barat mengusulkan agar warga miskin yang menerima bantuan sosial diwajibkan menjalani vasektomi. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, langsung menyuarakan penolakannya. Baginya, kebijakan itu tidak hanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

Hilmy melihat usulan tersebut sebagai bentuk pemaksaan yang tidak beradab. “Warga miskin berhak menentukan nasib tubuh dan keluarganya sendiri, bukan dipaksa menjalani prosedur medis,” tegasnya. Menurut Hilmy, mengaitkan syarat menerima bansos dengan tindakan vasektomi sama saja memperlakukan rakyat kecil dengan tidak adil dan tidak manusiawi.

Lebih jauh, Hilmy menjelaskan bahwa dari sudut pandang agama dan etika kemanusiaan universal, tindakan vasektomi tanpa alasan medis yang jelas dan mendesak tidak bisa dibenar-



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan. Ia pun mengingatkan, sejak awal program pengendalian penduduk pemerintah sudah meminta fatwa ulama untuk memastikan kebijakan itu sesuai nilai-nilai agama. Namun, memaksakan prosedur seperti ini jelas bertolak belakang dengan prinsip kesadaran dan kemanusiaan.

Hilmy juga menekankan bahwa jika memang ada persyaratan terkait program keluarga berencana, sebaiknya diberikan pilihan yang sifatnya sukarela, seperti alat kontrasepsi jangka panjang. “Mereka yang menerima bansos sudah dalam kondisi rentan, jangan sampai kebijakan justru semakin memperlemah posisi mereka,” ujarnya, awal April lalu.

Tidak hanya menolak wacana tersebut, Hilmy juga

mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah yang berpotensi melanggar hak warga negara. Ia mengingatkan bahwa bansos seharusnya menjadi instrumen negara untuk membantu masyarakat, bukan alat kontrol politik atau pengendalian paksa yang tidak etis.

Terakhir, Hilmy menyoroti pentingnya pembenahan data dan sistem distribusi bansos. Selama ini, banyak laporan bahwa bantuan sosial belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan. Menurutnya, ini adalah masalah utama yang harus segera diselesaikan agar bansos benar-benar memberi manfaat kepada mereka yang membutuhkan. (\*)

# UU BUMN Baru: Jerat Longgar untuk Koruptor

Nanda Russia Rola

Penulis

**D**i tengah harapan besar publik terhadap pemerintahan baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi, DPR RI justru mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menuai sorotan tajam. UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 yang menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2003 dinilai tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga mengandung pasal-pasal yang melemahkan semangat anti-korupsi. Hal ini disampaikan Senator asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, yang menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

Menurut Penrad, proses penyusunan undang-undang ini tidak memenuhi kaidah partisipasi publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya transparansi dalam pembahasan membuat UU BUMN yang baru ini layak disebut inkonstitusional. “Seharusnya masyarakat dilibatkan. Publik berhak tahu dan diberi ruang memberi masukan, apalagi ini menyangkut pengelolaan uang negara,” tegas Penrad dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Lebih mencurigakan lagi, kata Penrad, revisi UU ini mun-



Anggota DPD RI Penrad Siagian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

cul tiba-tiba tanpa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 ataupun *carry over* dari tahun sebelumnya. “Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa revisi ini begitu mendesak dan harus disahkan di awal masa sidang DPR RI periode 2024–2029? Ada apa di balik semua ini?” ujarnya retoris.

Dalam substansinya, UU BUMN yang baru dianggap membuka celah besar untuk penyalahgunaan kekuasaan. Penrad menyoroti setidaknya tiga ketentuan krusial yang membuat upaya penegakan hukum terhadap korupsi di tubuh BUMN menjadi tumpul. Salah satunya adalah pemangkas wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini hanya bisa melakukan audit terbatas atas permintaan DPR. “Ini bisa menjadi pintu masuk korupsi yang tak lagi terpantau,” ujarnya.

Lebih parah lagi, lanjut Penrad, penyelenggara BUMN tak lagi dikategorikan sebagai

penyelenggara negara.

Dampaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan kewenangannya menyetuh praktik korupsi di BUMN, kecuali dalam kasus yang menyangkut kerugian negara minimal Rp1 miliar dan melibatkan pejabat tinggi. “Ini langkah mundur. Sama saja mengeluarkan BUMN dari radar pemberantasan korupsi,” katanya prihatin.

Penrad juga menyoroti dihapusnya frasa “yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” dari definisi BUMN. Dengan begitu, dana negara yang disuntikkan ke BUMN tak lagi dianggap sebagai keuangan negara, sehingga terlepas dari pengawasan hukum negara.

“Bayangkan, uang rakyat yang dipakai, tapi tidak bisa diawasi sebagai uang negara. Ini absurd dan berbahaya,” tutup Penrad. Publik kini menunggu, apakah suara-suara kritis dari parlemen kamar kedua ini akan cukup menggugah nurani pembuat undang-undang. (\*)

# Ormas dan Batas Hukum: Suara Tegak dari Teras Narang

Rini Sumarni

Penulis

**D**i tengah meningkatnya tensi sosial di Kalimantan Tengah akibat aksi penyegelan sebuah pabrik oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), Senator Agustin Teras Narang angkat suara. Ia mengingatkan bahwa sekuat apa pun semangat perjuangan ormas, perannya dalam masyarakat tetap harus berada dalam bingkai hukum dan konstitusi. “Tidak bisa ada pihak yang bertindak di luar hukum, meskipun dengan dalih kepedulian sosial,” tegas Teras di Kalteng, awal Mei lalu.

Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode itu, ormas memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara jelas mengakui eksistensi ormas sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Namun, pengakuan ini bukan tanpa batas. “Ada garis konstitusional yang tidak boleh dilangkahi,” kata Teras, merujuk pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut.

Pernyataan Teras muncul menyusul keluhan sejumlah pelaku usaha yang merasa terganggu oleh tindakan sepihak ormas di sektor industri. Menurutnya, penyegelan dan intervensi langsung terhadap aktivitas ekonomi bukanlah ranah ormas. “Kalau ada pelanggaran, biarkan hukum yang berbicara. Negara punya mekanisme penegakan hukum. Jangan digantikan oleh tindakan sepihak,”

ujarnya serius.

Ia menegaskan, dalam

negara hukum seperti Indonesia, semua pihak harus menahan diri dari perilaku main hakim sendiri. Apalagi jika tindakan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi di daerah. Dalam konteks pembangunan, kestabilan sosial dan ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan yang tidak boleh dikorbankan.

Teras juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk tidak bersikap pasif terhadap fenomena ini. Dinamika ormas, kata dia, harus dikelola dengan pendekatan hukum dan dialog yang konstruktif. “Kalau tidak ditangani dengan bijak, pola-pola tekanan seperti ini bisa menyebar ke daerah lain dan menciptakan preseden buruk bagi iklim usaha,” katanya.

Sebagai senator yang lahir dan besar di bumi Tambun Bungai, Teras Narang berharap ormas di Kalimantan Tengah bisa menjadi mitra strategis pembangunan daerah. “Mari kita jadikan peran ormas sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, bukan menjadi pemantik konflik,” tuturnya, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kesadaran hukum demi masa depan daerah yang aman dan sejahtera. (\*)



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Riau dan Gema Keistimewaan yang Lama Terkubur

M. Fathoni

Penulis

**W**acana menjadikan Riau sebagai daerah istimewa kembali mencuat ke permukaan, membawa serta gelombang harapan dan kebanggaan dari tanah Melayu. Senator DPD RI asal Riau, Sewitri, menjadi salah satu suara lantang yang mendukung gagasan ini. Baginya, ini bukan sekadar manuver politik, melainkan upaya memulihkan martabat sejarah yang pernah menjadi denyut nadi kebudayaan dan kekuatan ekonomi di pesisir timur Sumatera. “Daerah istimewa bukan soal keistimewaan birokratis semata, tapi soal pengakuan terhadap jati diri dan kontribusi sejarah Riau terhadap Indonesia,” ujar Sewitri, dikutip dari Riaupos, Kamis (8/5/2025).

Riau memang bukan daerah biasa. Sejarah mencatat, wilayah ini pernah menjadi pusat Kesultanan Siak Sri Indrapura salah satu kerajaan Melayu terbesar yang tidak hanya berpengaruh di Semenanjung Malaya, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik hingga ke Timur Tengah dan Eropa. Kesultanan ini pula yang menjadi pelopor penyerahan kekuasaan kepada Republik Indonesia, menandai loyalitas historis terhadap NKRI. “Riau memiliki napas panjang peradaban yang tak bisa direduksi hanya sebagai provinsi penghasil minyak dan gas,” kata Sewitri.

Ia menekankan bahwa usulan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa bukan bermula dari ambisi politik sesaat. Wacana ini tumbuh dari akar budaya yang telah lama menunggu ruang untuk menyuarakan dirinya kembali. Menurutnya, sudah saatnya tata nilai Melayu, dengan falsafahnya yang menjunjung tinggi musyawarah, adat, dan kesantunan, diberi tempat dalam pengelolaan daerah. Keistimewaan itu bukan bentuk pemisahan, melainkan penguatan identitas dalam bingkai kebangsaan yang inklusif.

“Bayangkan jika kekayaan alam Riau dikelola dengan kearifan lokal, bukan sekadar diekstraksi untuk pusat. Atau jika pendidikan di Riau tak

hanya menanamkan ilmu, tetapi juga menghidupkan sastra dan nilai-nilai Melayu yang membentuk karakter generasi muda,” kata Sewitri. Ia menyebut, sudah waktunya pusat melihat Riau bukan hanya sebagai lumbung energi, tapi sebagai pusat nilai dan budaya yang ikut menopang kebangsaan.

Namun, ia juga menegaskan bahwa langkah menuju keistimewaan tidak bisa asal-asalan. Harus ada landasan akademik yang kuat, narasi sejarah yang utuh, dan dialog yang terbuka. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat akar rumput untuk duduk bersama membangun kerangka besar perjuangan ini. “Tanpa persiapan matang, keistimewaan hanya akan jadi wacana romantis yang tak pernah menyentuh realitas,” ujarnya.

Sewitri berharap, cita-cita menjadikan Riau sebagai daerah istimewa bisa menjadi awal kebangkitan budaya dan politik yang berakar pada sejarah. “Riau pernah jadi mercusuar budaya dan perdagangan dunia. Kini, saatnya kita menyalakan kembali cahaya itu, dengan menjadikannya bagian dari kebijakan nasional yang adil dan berkarakter,” tuturnya. Sebab, dalam denyut nadi Melayu, selalu hidup semangat untuk menjaga tanah air dengan akal budi, bukan dengan arogansi. (\*)



Anggota DPD RI Sewitri  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Gowa dan Bone Menuntut Hak Istimewa Sejarahnya

Theresia Oktavina

Penulis

**W**acana menjadikan Kota Surakarta sebagai daerah istimewa memantik reaksi dari berbagai daerah lain yang juga memiliki akar sejarah kerajaan yang kuat. Salah satunya datang dari Sulawesi Selatan. Sejarawan kenamaan Anhar Gonggong menyuarakan aspirasi agar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone juga diberikan status daerah istimewa. Kedua wilayah ini, menurutnya, bukan hanya pernah menjadi pusat kerajaan besar di kawasan timur Indonesia, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam menjaga dan mempertahankan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan.

“Saya bertanya, Solo mau jadi istimewa sebagai apa? Kalau diterima, saya juga akan menuntut Bone, Gowa, dan Luwu menjadi daerah istimewa,” kata Anhar Gonggong tegas, sebagaimana dikutip dari Tempo (2 Mei 2025). Ia menilai, tidak adil jika hanya satu kerajaan diberikan keistimewaan tanpa memperhatikan kerajaan-kerajaan lain yang punya sejarah perjuangan lebih kuat dan jejak yang lebih dalam dalam proses kebangsaan.

Dukungan terhadap ide ini juga datang dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Senator asal Sulawesi Selatan itu menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi masyarakat Gowa dan Bone apabila wacana keistimewaan tersebut benar-benar ingin diwujudkan. Ia meminta masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan dokumen pendukung dan naskah akademik agar tuntutan itu bisa diperjuangkan secara konstitusional di Jakarta. “Kami siap mengawalnya di Senayan, jika ini adalah kehendak masyarakat,” ucap Tamsil Linrung.

Sejarah mencatat, Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang pada abad ke-17 pernah menjadi kekuatan maritim utama dan pusat perdagangan di timur Nusantara. Sementara Bone dikenal



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sebagai kerajaan Bugis yang berpengaruh dan melahirkan banyak tokoh perjuangan, termasuk Arung Palakka dan tokoh perempuan legendaris, We Tenriolle. Kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam integrasi kawasan timur ke dalam NKRI, bahkan beberapa bangsawan dan pejuangnya turut menyumbangkan kekuatan militer serta dukungan politik di awal-awal Republik berdiri.

Selama ini, keistimewaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia baru diberikan kepada dua wilayah: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan itu didasarkan pada sejarah dan kontribusi unik keduanya terhadap negara, baik dalam bentuk penggabungan tanpa syarat maupun penerapan hukum syariat. Namun kini, daerah-daerah lain yang memiliki jejak sejarah yang tidak kalah kuat pun mulai menyuarakan hal serupa.

Anhar Gonggong dan Tamsil Linrung menegaskan, keistimewaan bukanlah soal hak istimewa elite, tetapi tentang pengakuan atas sejarah dan jati diri daerah yang telah memberi napas panjang bagi Republik. Jika semangat pengakuan terhadap budaya dan sejarah benar-benar hendak ditegakkan, maka Gowa dan Bone seperti halnya Riau, Luwu, dan kerajaan-kerajaan lama lainnya pantas diberikan ruang yang sama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang pernah berjaya dan berperan dalam membangun Indonesia. (\*)

# Jasela, Provinsi Khusus Penyangga Ketahanan Pangan Nasional

Adhi Nugroho

Penulis

**W**acana pemekaran wilayah di Indonesia terus menggeliat, namun usulan pembentukan Provinsi Jawa Tengah bagian selatan (Jasela) tampil dengan pendekatan berbeda. Tak berangkat dari klaim historis atau romantisme kerajaan masa lalu, aspirasi Jasela justru didorong oleh urgensi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Senator asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyebut wilayah selatan Jateng sangat potensial menjadi provinsi khusus yang dapat menopang kebutuhan pangan nasional secara signifikan.

Dalam diskusi bersama media di Purwokerto, Sabtu (3/5/2025), Abdul Kholik menegaskan bahwa pemekaran Jasela bukan sekadar pemerataan administratif, melainkan solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jateng. “Wilayah ini punya karakteristik dan potensi berbeda. Dengan skema provinsi khusus, pembangunan bisa lebih terarah dan cepat,” ujar Kholik.

Kawasan Jasela dikenal subur dan kaya akan potensi pertanian, agroindustri, serta maritim. Namun selama ini, pembangunan lebih terkonsentrasi di kawasan utara dan tengah Jawa Tengah. Abdul Kholik melihat hal ini sebagai ketimpangan yang perlu diselesaikan secara struktural. “Dengan pengelolaan yang benar, Jasela bukan hanya bisa swasembada pangan, tapi juga mampu mengeksplor. Ini sangat strategis bagi ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

Tak hanya potensi ekonomi, Kholik juga menyoroti celah konstitusional untuk menjadikan Jasela sebagai provinsi melalui jalur daerah khusus. Menurutnya, skema ini lebih



Anggota DPD RI Abdul Kholik saat berdiskusi dengan wartawan di Purwokerto. (Foto KR).

realistis dibanding pemekaran administratif biasa, karena tidak bertabrakan dengan moratorium daerah otonomi baru. Ia memastikan bahwa dari sisi regulasi dan dukungan Kemendagri, tidak ada hambatan yang berarti. “Jalur daerah khusus ini bisa dimanfaatkan sebagai terobosan percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Langkah ini, tambah Kholik, tak hanya akan membawa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jasela, tetapi juga memperkuat stabilitas nasional di bidang pangan. Selama ini, isu ketahanan pangan sering terpusat pada kawasan lain seperti Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Namun dengan munculnya Jasela sebagai provinsi khusus, peta pangan nasional bisa bergeser ke selatan Pulau Jawa.

Senator yang dikenal vokal dalam isu-isu pembangunan daerah ini berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Tengah bisa melihat potensi besar di balik usulan ini. Ia optimistis bahwa ke depan Jasela akan menjadi wilayah otonom yang mampu menjawab tantangan zaman, bukan hanya untuk Jawa Tengah, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. “Kita perlu lompatan, dan Jasela adalah jawabannya,” pungkash Kholik. (\*)

# Ada Dugaan Jual Beli Nilai di UIN Raden Intan Lampung

Helena AF Ojan

Penulis

**I**su dugaan pungutan liar dan jual beli nilai di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mencoreng dunia akademik sekaligus mencederai nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar berdirinya kampus tersebut. Sorotan tajam datang dari anggota DPD RI asal Lampung, Ahmad Bastian SY, yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN RIL. Ia mendesak Kementerian Agama segera turun tangan melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas kasus yang memalukan ini.

“Ini bukan hanya pelanggaran akademik, tapi penghinaan terhadap nilai-nilai moral dan agama. Sebagai alumni, saya sangat prihatin dan menyesalkan. Jual beli nilai ini merusak citra UIN sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjunjung tinggi integritas,” ujar Ahmad Bastian saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, langkah awal yang harus diambil adalah pemeriksaan terhadap oknum dosen dan pejabat kampus yang terindikasi menerima transfer uang dari mahasiswa. Ia meminta Kemenag untuk tidak menu-

tup-nutupi temuan ini dan menjadikan kasus ini sebagai momentum bersih-bersih di institusi pendidikan keagamaan. “Jika hasil investigasi mengarah pada tindak pidana, segera limpahkan ke APH. Ini soal akuntabilitas dan marwah pendidikan Islam,” tegasnya.

Dugaan praktik pungli yang terungkap melalui laporan media lokal Lampung ini mengejutkan publik. Mahasiswa diduga dijadikan objek transaksional untuk memperoleh nilai sidang skripsi, bahkan beberapa pe-tinggi kampus disebut-sebut menerima transfer langsung dari mahasiswa. Ironisnya, nomor rekening ditransfer secara terang-terangan, seolah praktik ini sudah menjadi kebiasaan yang dibiarkan.

Yang lebih mencengangkan, menurut dokumen yang diterima wartawan, besaran uang yang ditransfer justru sangat kecil: hanya berkisar antara

Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun nilainya tidak mengurangi bobot pelanggaran etik dan hukum yang terjadi. Dua nama dosen yang muncul ke permukaan adalah WA dan SD, yang diketahui menerima dana lewat rekening BRI masing-masing.

Ahmad Bastian berharap kasus ini tidak berhenti pada pemberitaan media semata. Ia meminta transparansi penuh dari pihak kampus dan Kemenag agar publik tahu siapa yang harus bertanggung jawab. “Ini bukan sekadar bersih-bersih nama kampus, tapi menyelamatkan generasi akademik kita dari budaya transaksional yang menghancurkan masa depan,” pungkasnya. (\*)



Ketua IKA UIN RIL Ahmad Bastian SY  
(Foto Ist)

# Komite III DPD RI Pulangkan Dua PMI Terlantar dari Turki

Betria Eriani

Penulis

**I**sak haru menyambut kepulangan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlantar di Istanbul, Turki, saat mereka akhirnya menginjakkan kaki kembali di tanah air. Mereka bukan pulang sendiri, melainkan didampingi langsung oleh Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang tengah menjalankan tugas pengawasan perlindungan PMI di luar negeri. Rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (14/5/2025), dan disambut Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

Kisah keduanya bermula dari pertemuan tak terduga saat Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Istanbul. Dua PMI non prosedural asal Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat itu ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di *shelter* Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul. Mereka terjebak di negeri orang, tanpa biaya untuk pulang, dan hanya mengandalkan bantuan seadanya dari pihak KJRI yang juga terkendala anggaran.

“Ketika kami tiba di sana, kami melihat langsung bagaimana mereka benar-benar dalam kondisi yang



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyambut kedatangan dua orang PMI non prosedural yang dibawa pulang oleh Komite III DPD RI dari Turki, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Foto Biro PHM Stjen DPD RI)

memerlukan pertolongan cepat. Tidak mungkin kami biarkan begitu saja,” ungkap Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menceritakan pengalaman emosional tersebut. Ia menegaskan bahwa misi mereka bukan sekadar pengawasan, tetapi juga penyelamatan nyata terhadap warga negara yang terabaikan.

Koordinasi cepat pun dilakukan antara Komite III dan KJRI Istanbul. Dalam waktu singkat, proses administrasi dan pengurusan pemulangan dipercepat agar kedua PMI bisa segera kembali ke Indonesia. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dan langkah nyata Komite III dalam menangani langsung permasalahan di lapangan. “Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bukan hanya dalam pernyataan, tapi juga tindakan,” ujarnya.

Kisah ini, menurut Tamsil, hanyalah salah satu potret dari banyak permasalahan PMI di berbagai negara. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga martabat dan keselamatan para pekerja migran. “Kita perlu membenahi dari hulu ke hilir. Dari proses perekrutan hingga jaminan perlindungan mereka selama bekerja di luar negeri,” tambahnya.

DPD RI melalui Komite III menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Komitmen itu bukan hanya dalam bentuk pengawasan di atas kertas, tapi juga hadir langsung di titik-titik krusial demi memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, di manapun berada, tetap mendapatkan hak dan perlindungan yang layak dari negaranya. (\*)

# Jangan Tergiur Jalan Pintas, Haji Tetap Lewat Jalur Resmi

M Fathoni

Penulis

**K**inginan menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim, namun Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, mengingatkan agar niat suci itu tidak dirusak oleh godaan jalan pintas yang menyesatkan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti jalur resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), bukan melalui visa non-haji yang kian marak ditawarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Jangan tergiur dengan tawaran berangkat cepat yang menggunakan visa pekerja, visa ziarah, visa bisnis, atau jenis visa lain yang tidak diperuntukkan bagi ibadah haji. Itu tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan,” tegas Erni, Rabu (14/5/2025). Senator asal Kalimantan Tengah ini menekankan pentingnya kesabaran dalam proses daftar tunggu resmi sebagai bagian dari ibadah itu sendiri.

Erni mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak kasus jemaah yang akhirnya tertahan di Arab Saudi, dipulangkan sebelum sempat berhaji, atau bahkan kehilangan uang karena tertipu biro perjalanan abal-abal. “Banyak yang ingin berhaji mabrur,



Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Jangan tergiur dengan tawaran berangkat cepat yang menggunakan visa pekerja, visa ziarah, visa bisnis, atau jenis visa lain yang tidak diperuntukkan bagi ibadah haji. Itu tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan.**”

**Wakil Ketua Komite III  
DPD RI,  
Erni Daryanti**

tapi karena tergiur jalan pintas, malah berakhir kabur,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi inisiatif KJRI Jeddah yang meluncurkan kampanye edukatif bertajuk Jihad Medsos untuk menangkal hoaks dan informasi menyesatkan soal haji. Salah satu pesannya yang kuat dan mengena: “Uang

Hilang, Haji Melayang.” Erni mengajak masyarakat untuk ikut menyebarkan pesan ini sebagai bentuk ikhtiar kolektif menjaga keselamatan dan kesucian ibadah haji.

Sebagai pimpinan Komite III yang membidangi urusan keagamaan, ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap *travel* haji dan umrah, serta menindak tegas para pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan jemaah. “Ini soal perlindungan terhadap warga negara sekaligus penghormatan terhadap ibadah,” tambahnya.

Di akhir pesannya, Erni kembali mengingatkan: ibadah haji bukan hanya tentang sampai ke Tanah Suci, tapi juga tentang niat, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan. “Jalan resmi memang panjang, tapi itulah jalan yang *insya Allah* membawa kita pada haji yang sah dan mabrur,” tutupnya dengan harap. (\*)

# Menjembatani Persahabatan: DPD RI Terima Delegasi Parlemen Ceko

Lela Sadiyah

Penulis

**S**uasana hangat diplomasi tergambar jelas di Gedung DPD RI ketika Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyambut kunjungan delegasi Parlemen Republik Ceko, Rabu (14/5/2025). Dipimpin Wakil Ketua Parlemen Jan Skopeček, rombongan tersebut juga terdiri dari Ketua Komite Urusan Eropa Ondřej Benešik, sejumlah anggota Komite Kerja Sama Luar Negeri, serta Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleček.

Pertemuan ini menjadi penanda eratnya hubungan Indonesia-Ceko yang telah terjalin selama tujuh dekade. “Kita tidak hanya memperingati sejarah panjang persahabatan, tapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera,” ujar Tamsil dalam sambutannya.

Ia menyinggung penandatanganan *letter of intent* antara kedua negara pada 2021 yang berfokus pada kerja sama perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kerja sama ini harus diperluas hingga



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama delegasi Parlemen Republik Ceko. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. “Isu lingkungan tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Perlu pendekatan kolaboratif lintas sektor,” tegas Tamsil.

Langkah konkret pun mulai terlihat, seperti rencana pendirian Konsulat Kehormatan Republik Ceko di Palu, Sulawesi Tengah. Tamsil menyambut baik inisiatif ini karena dinilai dapat membuka peluang kerja sama investasi dan pariwisata berbasis potensi daerah. “Ini cara cerdas memperkuat diplomasi dari pusat hingga ke daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Jan Skopeček menyampaikan apresiasinya atas hubungan diplomatik yang berjalan lancar dan tanpa hambatan

berarti. Ia menyatakan ketertarikan untuk memperluas kerja sama ke sektor strategis seperti keamanan siber, pendidikan, dan energi terbarukan. “Kami ingin jadi mitra aktif Indonesia dalam menjawab tantangan global,” ungkapnya.

Skopeček secara khusus menyoroti pentingnya program pertukaran pelajar yang sempat terhenti akibat kendala pembiayaan. Ia berharap program tersebut dapat segera dihidupkan kembali, karena pendidikan adalah jembatan paling efektif untuk membangun pemahaman lintas budaya. “Kami juga siap membantu Indonesia memperkuat koneksi dengan negara-negara Uni Eropa,” tuturnya. (\*)

# Abdul Kholik: Sekolah Swasta Bisa Jadi Basis Sekolah Rakyat



Anggota DPD RI Abdul Kholik. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Rini Sumarni**

Penulis

**A**lih-alih membangun sekolah baru dari nol, Anggota DPD RI Abdul Kholik mengusulkan pendekatan yang lebih efisien untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, sekolah swasta yang telah ada bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk menjalankan program pendidikan rakyat secara efektif dan hemat anggaran.

“Implementasinya tidak harus dimulai dari membangun sekolah baru. Gunakan saja sekolah swasta yang sudah berjalan. Pemerintah tinggal memfasilitasi kebutuhan gedung, guru, dan operasionalnya. Ini jauh lebih mudah dan tidak butuh investasi besar,” kata Kholik dalam silaturahmi bersama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Per-

“**Implementasinya tidak harus dimulai dari membangun sekolah baru. Gunakan saja sekolah swasta yang sudah berjalan. Pemerintah tinggal memfasilitasi kebutuhan gedung, guru, dan operasionalnya. Ini jauh lebih mudah dan tidak butuh investasi besar.**”

**Anggota DPD RI,  
Abdul Kholik**

gunu) se-Kabupaten Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (14/5/2025).

Bagi Kholik, pendekatan ini bukan sekadar efisiensi, tapi juga bentuk keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir di semua jenis pendidikan baik negeri

maupun swasta tanpa memandang status. “Tidak boleh ada diskriminasi. Guru dan siswa di sekolah swasta pun harus mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.

Gagasan ini disambut antusias oleh Ketua Pengurus Cabang Perguru Kabupaten Batang, Nur Khoyin. Ia menilai banyak sekolah swasta di daerahnya yang potensial dijadikan Sekolah Rakyat. “Daripada bangun baru, lebih baik diformalisasikan saja dari yang sudah ada. Biaya yang dihemat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya.

Fakta di lapangan mendukung urgensi itu. Data Perguru Batang menunjukkan, dari 1.432 guru yang tergabung dalam organisasi, lebih dari 1.100 orang belum memperoleh kesejahteraan layak. Kondisi ini menjadi cermin bahwa pemerataan pendidikan tak bisa hanya fokus pada siswa, tapi juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan sekolah swasta, Abdul Kholik percaya pendidikan berkualitas bisa segera dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tak perlu menunggu pembangunan fisik yang lama dan mahal, karena solusi sebenarnya sudah ada: tinggal dirangkul dan diperkuat. (\*)

# Menjaga Hutan, Menjaga Identitas Papua Barat Daya

Arso P Nugroho

Penulis

**D**engan tutupan hutan mencapai 91 persen, Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi dengan bentang alam terhijau di Indonesia. Keunikan ini menjadi perhatian Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang melaksanakan kunjungan kerja pada Kamis, 8 Mei 2025, guna melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menakar arah kebijakan pengelolaan hutan di provinsi termuda ini.

Kunjungan tersebut diisi dengan pertemuan bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, perwakilan kementerian terkait, DPRD, Majelis Rakyat Papua, kepala daerah se-provinsi, tokoh adat, hingga pelaku usaha. Semua berkumpul dalam satu forum untuk membahas masa depan hutan Papua Barat Daya yang bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga nilai budaya dan spiritual masyarakat adat setempat.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikannya bahwa di balik angka



Komite II DPD RI dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

91 persen tutupan hutan, tersimpan berbagai tantangan yang tidak ringan. Konflik lahan, degradasi hutan, hingga sulitnya mengakses mekanisme pelepasan kawasan hutan menjadi masalah pelik yang harus dihadapi. Namun demikian, Pemprov tak tinggal diam. Skema perhutanan sosial dan konservasi karbon terus didorong sebagai strategi pelestarian yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, dalam dialog tersebut menegaskan pentingnya menjaga hutan sebagai identitas masyarakat Papua. Ia juga menyoroti dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam praktiknya menimbulkan multitafsir di daerah. “Kita harus pastikan bahwa pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat tetap menjadi prioritas,” ujarnya penuh ketegasan.

Dalam sesi diskusi yang dipimpin Senator Abd. Waris Halid, terungkap bahwa wilayah Papua Barat Daya memi-

liki kawasan hutan konservasi seluas 1,2 juta hektare, hutan lindung 772 ribu hektare, serta beragam jenis hutan produksi lainnya. Tak kurang dari enam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengelola total lahan seluas 2,2 juta hektare sebuah angka fantastis yang mencerminkan besarnya tanggung jawab konservasi.

Perwakilan Kementerian Kehutanan, M. Jandi Pinem, mengungkapkan bahwa 1,2 juta hektare kawasan hutan telah dibebani izin, sementara 1,3 juta hektare lainnya belum tersentuh izin dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau produksi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap rencana di luar sektor kehutanan harus melalui prosedur formal seperti permohonan pemanfaatan atau pelepasan kawasan hutan. Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar hutan Papua tidak hanya lestari, tapi juga bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya. (\*)

# Komite III DPD RI Tegaskan Komitmen Lindungi PMI di Turki

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**L**angit Istanbul tampak cerah pada Kamis pagi, 8 Mei 2025, ketika delegasi Komite III DPD RI memulai kunjungan kerjanya ke kota penuh sejarah itu. Kegiatan ini bukan sekadar lawatan biasa. Di balik dinding-dinding megah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul, pertemuan serius berlangsung membahas nasib para anak bangsa yang merantau sebagai pekerja migran di Turki.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Di hadapan Konsul Jenderal Darianto Harsono, Ketua Komite III Filep Wamafma dan para anggota menyampaikannya keprihatinan sekaligus komitmen mereka untuk memastikan perlindungan yang layak bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

Agenda berlanjut dengan forum dialog yang mempertemukan langsung para senator dengan PMI dan WNI yang tinggal di Istanbul dan sekitarnya. Di sinilah suara-suara tulus terdengar. Ce-



Rombongan Komite III DPD RI sedang berada di KJRI Istanbul, Turki. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

rita-cerita haru, keresahan, harapan, dan aspirasi mengalir tanpa sekat. Komite III mendengarkan dengan saksama, menjadikan ruang dialog itu sebagai jembatan penting antara pembuat kebijakan dan rakyat di luar negeri.

“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa amanat UU PPMI betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pekerja migran,” tegas Filep Wamafma. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang baik hanya akan lahir jika dibuat berdasarkan pemahaman nyata terhadap persoalan di lapangan.

Senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengingatkan pentingnya prosedur legal dalam keberangkatan PMI. Menurutnya, keberangkatan yang sesuai jalur resmi memu-

dahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum apabila terjadi masalah. “Langkah awal yang benar akan membawa perlindungan yang lebih besar di negeri orang,” ujarnya.

Tak hanya berhenti pada diskusi, kunjungan kerja ini juga membuahkkan aksi konkret. Komite III DPD RI bersama KJRI Istanbul turut membantu proses pemulangan dua PMI yang tengah mengalami persoalan serius. Keduanya diketahui masuk ke Turki secara non-prosedural, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan hambatan hukum. Keterlibatan DPD RI dalam upaya ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan pekerja migran bukan hanya janji, tapi komitmen yang dijalankan dengan sepenuh hati. (\*)

# Kemitraan Strategis Indonesia–Vietnam: Dari Parlemen, Untuk Kawasan

Lela Sadiyah

Penulis

**L**angit Jakarta tampak teduh saat diplomasi dua negara bertemu dalam semangat persahabatan. Selasa pagi, 6 Mei 2025, Gedung DPD RI menjadi saksi pertemuan hangat antara Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI dan Duta Besar Republik Sosialis Vietnam, Ta Van Thong. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari kunjungan penting Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Dibuka oleh Wakil Ketua BKSP DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kepercayaan dan visi bersama. Dalam sambutannya, Mirah menekankan bahwa hubungan bilateral Indonesia–Vietnam telah memasuki fase baru yang sangat positif setelah lebih dari 70 tahun persahabatan. Salah satu tonggak keberhasilan nyata yang disebut adalah kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan perbatasan kedua negara.

Namun lebih dari sekadar pencapaian antar-pemerintah, BKSP mendorong agar kerja sama konkret juga menyentuh sektor swasta, khususnya pelaku usaha



Pimpinan dan anggota BKSP DPD RI bersama Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

daerah. “Interaksi ekonomi antar-BUMN penting, tetapi keterlibatan pengusaha lokal akan memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan memperluas manfaat kerja sama strategis ini,” ujar Senator asal Nusa Tenggara Barat itu.

Nada yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua BKSP lainnya, Darmansyah Husein. Ia menilai, langkah kedua negara dalam meningkatkan status hubungan dari *Strategic Partnership* (2013) ke *Comprehensive Strategic Partnership* (2025) harus diikuti dengan inisiatif konkret. “Kami ingin memperkaya kerja sama bukan hanya di tingkat negara, tapi juga antarpemerintahan dan antarpemerintahan daerah,” katanya dengan optimis.

Mewakili Vietnam, Dubes Ta Van Thong merespons

ajakan itu dengan antusias. Ia menegaskan pentingnya kerja sama ekonomi yang adaptif di tengah tantangan global, seperti gangguan rantai pasok dan dinamika tarif internasional. “Vietnam dan Indonesia mewakili lebih dari 60 persen penduduk ASEAN. Ada begitu banyak potensi yang masih bisa digali bersama, termasuk di sektor perdagangan dan industri,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi lebih dari sekadar dialog diplomatik. Ia adalah jembatan harapan, di mana parlemen sebagai representasi rakyat membangun jalur-jalur kemitraan yang tidak hanya strategis di atas kertas, tetapi juga menyentuh langsung denyut ekonomi dan sosial rakyat kedua negara. (\*)

# Ketika Suara dari Desa dan Terminal Minyak Menggema di Senayan



BAP DPD RI mengundang pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa lahan dan ketenagakerjaan yang terjadi di daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**S**enin pagi, 5 Mei 2025. Di sebuah ruang rapat di kompleks Gedung DPD RI, Jakarta, suara-suara yang selama ini hanya bergema lirih dari pelosok Sumatera Selatan dan Papua Barat Daya akhirnya menemukan panggungnya. Di hadapan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, sejumlah aduan masyarakat diperdengarkan tentang lahan yang dirampas, dan hak-hak pekerja yang terabaikan.

Rapat Dengar Pendapat ini menghadirkan Kanwil BPN Sumatera Selatan, SKK Migas, PT Musi Hutan Persada, serta perwakilan kementerian dan pemerintah daerah. Semua dikumpulkan

oleh BAP DPD RI untuk satu tujuan memastikan keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi hadir nyata di tanah dan kehidupan warga.

“Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah jati diri, warisan budaya, dan simbol kedaulatan masyarakat,” tegas Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim. Kalimat itu bukan retorika kosong, tetapi cerminan dari getirnya laporan warga Desa Gedung Agung dan Desa Arahau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Mereka mengadukan tindakan sepihak PT Musi Hutan Persada yang diduga merampas tanah kebun mereka lahan yang telah digarap turun-temurun.

Tak hanya dari Sumatera, suara kegelisahan juga datang dari timur negeri. Mantan

karyawan Petrochina International Ltd dan Petrogas Ltd di Kasim Marine Terminal, Distrik Seget, Papua Barat Daya, melaporkan dugaan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam relasi kerja. Dalam industri migas yang penuh risiko, mereka merasa tak mendapat perlindungan semestinya.

Menurut Abdul Hakim, aduan-aduan seperti ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga kemanusiaan dan masa depan daerah. “Terlalu banyak kasus serupa yang terjadi di lapangan mal administrasi, pelanggaran wewenang, tumpang tindih regulasi dan masyarakat yang terus menjadi korban,” ujarnya prihatin.

Di tengah tumpukan laporan yang kian bertambah, BAP DPD RI memilih untuk tidak diam. Mereka menuntut agar semua pihak, dari kementerian hingga pemda, benar-benar hadir di tengah rakyat. Bukan hanya dengan kebijakan di atas kertas, tapi dengan solusi nyata di lapangan.

Dari ruang rapat Senayan, harapan itu kembali disuarakan agar negara tak alpa dalam mendengar dan menjawab keluh-kesah mereka yang tinggal jauh dari pusat, tetapi tak pernah kehilangan hak untuk diperjuangkan. (\*)

# Sertifikasi Halal: Peluang atau Beban bagi UMKM?

Rini Sumarni

Penulis

**P**agi itu, ruang rapat di Gedung DPD RI kembali menjadi saksi perdebatan penting seputar masa depan jutaan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Topiknya bukan baru, tapi semakin mendesak kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada 2026.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, membuka pembicaraan dengan nada tegas namun bersahabat. “Kejelasan status halal produk bukan sekadar tuntutan keagamaan, tapi kebutuhan konsumen dan peluang besar bagi UMKM menembus pasar global,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPJPH, Kamis (8 Mei 2025).

Namun di balik peluang itu, ada kegelisahan. Dailami mencatat banyak pelaku UMKM terutama di daerah masih terbentur persoalan teknis rumitnya administrasi, biaya proses, hingga minimnya pemahaman terhadap regulasi. “Kalau tidak dikelola dengan pendekatan inklusif, kewajiban ini bisa berubah jadi beban tambahan yang berat,” katanya.

Senator Denty Eka Widi Pratiwi dari Jawa Tengah menambahkan pengalaman serupa dari daerahnya. Banyak pelaku UMKM merasa sertifikasi halal adalah “urusan orang



Wakil Ketua DPD RI Dailami Firdaus didampingi sejawatnya Jelita Donal dan Erni Daryanti saat memimpin RDP bersama Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Kejelasan status halal produk bukan sekadar tuntutan keagamaan, tapi kebutuhan konsumen dan peluang besar bagi UMKM menembus pasar global.”

Wakil Ketua Komite III  
DPD RI,  
Dailami Firdaus

kota” yang mahal dan sulit dijangkau. “Ada kesan, sertifikasi halal itu susah dan biayanya mahal. Ini butuh sosialisasi yang lebih masif dan pendekatan yang membumi,” katanya.

Pemerintah, melalui BPJPH, memang telah membuka jalan menuju sistem halal nasional yang lebih kokoh. Tapi jalan itu mesti dilalui dengan

panduan yang jelas, kemudahan akses, dan dukungan teknis untuk para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

DPD RI, melalui Komite III, bertekad menjadi jembatan antara niat baik kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Sertifikasi halal harus menjadi alat pemberdayaan, bukan penghalang. “Kami akan kawal agar kebijakan ini berpihak kepada UMKM, bukan malah menyingkirkan mereka dari rantai pasar,” tegas Dailami.

Di balik label halal yang sederhana itu, ada harapan besar seperti untuk kemurnian produk, kepercayaan konsumen, dan masa depan pelaku usaha kecil yang mampu bersaing di pasar halal dunia. Namun untuk sampai ke sana, jalan yang dilalui harus inklusif, adil, dan memberdayakan. (\*)

# Label Halal Butuh Evaluasi Berkala



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan usai menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**I**su kehalalan produk kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komite III DPD RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kamis (8/5/2025). Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal menekankan pentingnya perlindungan konsumen Muslim dari produk makanan yang menyesatkan. Ia mengusulkan agar label halal tidak hanya berbentuk tulisan atau logo semata, melainkan dilengkapi dengan *barcode* digital yang sulit dipalsukan.

“Kalau cuma tulisan, semua orang bisa pakai. Maka jangan heran kalau kita masih menemukan produk

berlogo halal ternyata mengandung babi,” tegas senator asal Sumatera Barat itu. Ia juga mendorong adanya masa berlaku dalam sertifikasi halal, sehingga dapat dievaluasi secara berkala. Menurutnya, produsen harus menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kehalalan produknya.

Senada dengan Jelita Donal, anggota DPD RI dari Gorontalo, Jasin Usman Dilo, menggarisbawahi lemahnya pengawasan pascasertifikasi. Ia mencontohkan temuan produk permen yang ternyata mengandung unsur babi, padahal telah berlabel halal dan tersebar luas di pasaran. “Yang diperlukan bukan hanya sertifikat, tapi konsistensi dalam pengawasan. Kita harus menjamin produk itu tetap halal setelah mendapat

sertifikasi,” ujarnya.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengakui tantangan besar dalam menjaga integritas sertifikasi halal. Berdasarkan data dari Aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) per 7 Mei 2025, sebanyak 2.204.299 sertifikat halal telah diterbitkan, mencakup lebih dari 6,1 juta produk. Namun, ia menyatakan, ini baru permulaan dari upaya besar yang akan diperluas ke berbagai sektor.

“Sekarang kami masih fokus pada makanan, minuman, dan hasil sembelihan. Tapi mulai tahun 2026, produk yang wajib halal akan diperluas, termasuk obat-obatan, kosmetik, sandang, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga,” ungkap Ahmad Haikal Hasan. Untuk itu, BPJPH sangat mengharapkan dukungan dari DPD RI, terutama dalam pengawasan dan edukasi masyarakat.

Langkah-langkah penguatan ini dinilai penting di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal. Dengan sistem sertifikasi yang bisa dievaluasi, pengawasan rutin, serta inovasi keamanan seperti *barcode* halal, kepercayaan publik terhadap label halal diharapkan makin kokoh. Sebab, bagi umat Islam, kehalalan bukan sekadar label, tetapi prinsip hidup yang tak bisa ditawar. (\*)

# Senator Kembali Soroti *Skincare* Belum Bersertifikat Halal

Theresia Oktavina

Penulis

**S** *skincare* atau produk perawatan kulit kini bukan sekadar tren kecantikan, tetapi sudah menjadi kebutuhan harian banyak orang. Namun, di balik popularitasnya, Anggota Komite III DPD RI Agita Nurfianti mengingatkan tentang bahaya tersembunyi dari produk *skincare* yang belum bersertifikat halal, terutama bagi umat Islam. Dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kamis (8/5/2025), Agita menekankan urgensi pengawasan dan sertifikasi yang lebih ketat.

“Produk *skincare* ini setiap hari menempel di kulit umat Islam. Kalau tidak halal, bisa memengaruhi keabsahan ibadah, terutama salat,” ujar senator muda dari DKI Jakarta itu. Ia juga menyoroti masih adanya kandungan berbahaya seperti merkuri dan bahan najis dalam beberapa produk, termasuk *hand and body lotion*. “Saya minta perhatian khusus. Beberapa lotion diketahui mengandung bahan dari babi,” tegasnya.

Agita menjelaskan, sertifikasi halal untuk produk

*skincare* bukan hanya persoalan label, tetapi menyangkut kepastian hukum, keamanan, dan ketenangan beribadah. Produk halal dinilai lebih terpercaya karena telah melalui proses audit bahan baku dan produksi yang transparan. “Ini menyangkut keyakinan umat. Kita ingin pastikan produk yang digunakan umat tidak hanya aman, tapi juga sesuai syariah,” tambahnya.

*Skincare* halal juga dinilai punya nilai ekonomi strategis. Tak hanya menasar konsumen muslim, produk halal kini mulai dilirik pasar global yang mengutamakan transparansi dan etika produksi. Sertifikasi halal bisa menjadi daya saing tambahan bagi produsen kosmetik dalam dan luar negeri. Konsumen pun merasa lebih aman dan percaya terhadap kualitas produk.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa

kewajiban sertifikasi halal untuk produk *skincare* akan mulai berlaku pada 2026. “Tapi sekarang pun banyak yang sudah mulai mengurus. Ada dorongan dari publik dan persaingan di media sosial yang mendorong produsen untuk bergerak lebih cepat,” jelasnya. Ia menambahkan, BPJPH bekerja sama erat dengan BPOM, terutama dalam mengawasi bahan-bahan berbahaya seperti merkuri.

Menurut Haikal, BPJPH fokus pada kehalalan bahan dan proses produksi, sementara BPOM mengawasi aspek keamanan dan kesehatan. “Soal merkuri, itu wewenangnya BPOM. Tapi kami terus bersinergi untuk memastikan masyarakat

tidak hanya mendapat produk halal, tapi juga aman dan layak pakai,” pungkasnya. (\*)



Anggota DPD RI Agita Nurfianti  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Regulasi Sampah Harus Efektif, Bukan Sekadar Wacana

Adhi Nugroho

Penulis

**M**asalah pengelolaan sampah di Indonesia tak lagi bisa dianggap sepele. Di tengah pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, sampah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Agita Nurfianti, menegaskan perlunya regulasi yang lebih tajam dan aplikatif demi mendukung pengelolaan sampah yang efektif di daerah.

“Permasalahan pengelolaan sampah semakin kompleks. Regulasi menjadi instrumen hukum yang vital dalam mengatur kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan di tingkat lokal,” ujar Agita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar lingkungan dan akademisi, Senin (5/5/2025). Menurutnya, tanpa dukungan regulasi yang kuat, inisiatif pengelolaan dan daur ulang sampah sulit berkembang secara maksimal.

Senator Mirah Midadan Fahmid turut mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman krisis pengelolaan sampah nasional pada 2045 jika tidak segera dilakukan reformasi menye-



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI bersama akademi dan pakar persampahan usai rapat dengar pendapat umum. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

luruh. Ia menyoroti kelembagaan pengelolaan sampah di daerah yang kerap tumpang tindih, di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran ganda sebagai regulator sekaligus operator. “Sistem seperti ini rawan konflik kepentingan dan tidak efisien,” tegas Mirah.

Mirah mendorong pemisahan tegas antara fungsi pengawasan dan operasional sebagaimana rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, daerah harus mengadopsi model kelembagaan yang lebih profesional dan akuntabel agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada tumpukan proyek, tapi menghasilkan perubahan nyata.

Langkah-langkah inovatif seperti yang diterapkan Jakarta dan Surabaya mendapat apresiasi dari para senator. Di

Jakarta, melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menggandeng industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif *Refuse Derived Fuel* (RDF). Sementara Surabaya sukses memproduksi energi listrik dari sampah melalui skema kerja sama swasta di PSEL Benowo. “Daerah lain harus mencontoh model-model ini,” tandas Mirah.

Rapat dengar pendapat ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar isu teknis, tapi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. DPD RI mendorong hadirnya regulasi yang tak hanya bagus di atas kertas, tapi juga efektif di lapangan menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan tentu saja, menjaga bumi tetap lestari. (\*)

# Sampah Jadi Berkah: Inovasi dan Peluang Ekonomi dari Limbah

Helena AF Ojan

Penulis

Pengelolaan sampah di Indonesia tak lagi bisa ditunda. Masalah yang selama ini dianggap sekadar urusan kebersihan, kini telah berkembang menjadi persoalan lingkungan dan ekonomi yang kompleks. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Senin (5/5/2025), Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Guntur Sitorus, menegaskan bahwa sampah semestinya dikelola secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur pendukung.

Guntur menyoroti budaya buang sampah sembarangan yang masih melekat di masyarakat, baik di jalanan maupun di sungai. Menurutnya, diperlukan perubahan pola pikir melalui pendidikan dan sosialisasi, agar masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga peluang ekonomi. “Kalau dikelola dengan benar, sampah itu bisa menjadi sumber penghasilan. Tapi semua harus dimulai dari perubahan perilaku dan sistem yang jelas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh mantan Bupati Banyumas, Achmad Husein, yang berbagi pengalaman sukses dalam mengolah sampah menjadi energi dan produk industri. Di masa kepemimpinannya, Kabupaten Banyumas berhasil mengembangkan teknologi pirolisis untuk mengubah sampah menjadi minyak pengganti minyak tanah dengan biaya produksi hanya Rp3.000 per liter dan nilai jual mencapai Rp17.000 per liter. Selain itu, limbah plastik juga diolah menjadi karbon pengganti batu bara untuk industri semen, kertas, dan PLN.

Tak hanya itu, Husein yang dikenal sebagai “Bapak Sampah Nasional”, juga pernah



Mantan Bupati Banyumas Achmad Husein memperlihatkan minyak pyrolysis dari hasil pengolahan sampah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mengembangkan *paving block* dari sampah plastik. Namun, inovasi tersebut kandas di tengah jalan karena belum adanya regulasi yang mendukung pemasaran produk hasil daur ulang. “Padahal kalau bisa dipasarkan, akan membuka lapangan kerja dan mempercepat pengurangan sampah,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi akademik, pakar polimer dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmad Zainal Abidin, menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Ia memperkenalkan metode depolimerisasi ippo masaro yang memungkinkan sampah membusuk menjadi pupuk organik cair dalam waktu singkat, hanya dalam satu jam hingga sepuluh hari, tanpa menimbulkan bau. “Satu kilogram sampah bisa menjadi 12 liter POCI (Pupuk Organik Cair Istimewa). Ini terobosan penting yang bisa diaplikasikan secara luas,” terangnya.

Semua pendapat dan pengalaman dalam forum RDPU itu memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan sampah bukan lagi sekadar tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Ini adalah kerja kolektif antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan kesadaran bersama, sampah yang selama ini menjadi sumber masalah bisa diubah menjadi berkah yang bernilai ekonomi tinggi. (\*)

# Warisan Budaya, Pilar Jati Diri dan Penggerak Ekonomi Bangsa

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**D**i tengah arus globalisasi yang melaju pesat, pelestarian budaya menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus, mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan budaya sebagai warisan luhur yang tak ternilai. Menurutnya, budaya bukan hanya soal seni dan tradisi, tetapi menjadi pilar utama dalam memperkuat jati diri nasional di tengah derasnya pengaruh luar.

Dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Rabu (7/5/2025), Dailami mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi budaya lokal yang semakin terpinggirkan. Modernisasi dan teknologi memang membawa kemajuan, tapi juga memberi tekanan besar terhadap eksistensi budaya tradisional.

Minimnya dokumentasi, regenerasi pelaku budaya yang lemah, serta terbatasnya dukungan kebijakan dan anggaran membuat sejumlah warisan budaya berada di ambang kepunahan.

Karena itu, ia mendorong Kementerian Kebudayaan agar menyusun program prioritas yang menyentuh kebutuhan riil di daerah. Menurut Dailami,



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal harus dijadikan agenda utama. “Kebijakan budaya tidak bisa satu arah dari pusat, tapi harus kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan setiap daerah,” tegasnya.

Fakta menunjukkan, hingga akhir 2024, Indonesia telah menetapkan 2.213 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersebar di seluruh provinsi. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.941 WBTB pada 2023. Sejak 2008, sebanyak 15 di antaranya bahkan telah diakui UNESCO sebagai bagian dari *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sembilan situs warisan dunia, menjadikannya negara dengan jumlah terbanyak di Asia Tenggara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebu-

dayaan sebagai landasan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan kebudayaan sebagai fondasi identitas nasional. Fadli yakin, budaya bukan hanya untuk dilestari-kan, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang berkelanjutan. “Budaya adalah *binding power* kita sebagai bangsa. Dengan pengelolaan yang tepat, budaya bisa jadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dengan kekayaan budaya yang begitu melimpah, Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial dan ekonomi yang luar biasa. Namun kekayaan itu hanya akan bermakna jika dirawat, dijaga, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketika warisan budaya diberi tempat terhormat dalam kebijakan nasional, maka jati diri bangsa akan semakin kokoh dan budaya tak hanya hidup dalam kenangan, tetapi juga memberi kehidupan. (\*)

# Menata Ulang Dasar Hukum Kabupaten dan Kota

Helena AF Ojan

Penulis

**U**paya memperkuat landasan hukum daerah terus dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Salah satu langkah penting itu diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Komite I DPD RI secara khusus menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pemerintah provinsi setempat pada Rabu (14/5/2025), guna menghimpun masukan langsung dari daerah.

Masukan ini menjadi elemen krusial untuk memastikan RUU mencerminkan karakteristik unik masing-masing kabupaten dan kota. Selain soal hari jadi dan sejarah pembentukan daerah, pembahasan juga mencakup batas wilayah, cakupan administrasi, serta titik koordinat wilayah yang akan dicantumkan dalam lampiran undang-undang. Tujuannya jelas: mencegah terjadinya sengketa batas wilayah antar daerah di masa depan.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia masih berpi-



Penandatanganan kesimpulan rapat antara Komite I DPD RI dengan tiga pemerintahan provinsi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

jak pada dasar hukum yang sudah usang. Banyak di antaranya mengacu pada Undang-Undang masa UUDS 1950, yang kini dinilai tak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, hukum, maupun tata pemerintahan modern. “Karena itu, DPR RI menggunakan hak inisiatifnya untuk menyempurnakan seluruh undang-undang tentang provinsi, kabupaten, dan kota dengan versi terbaru, dan DPD RI dilibatkan aktif dalam proses itu,” jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengungkapkan bahwa hingga kini, sejumlah kabupaten seperti Kolaka, Konawe, Muna, dan Buton masih mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 1959 sebagai dasar hukum pembentukannya. Persoalan klasik seperti batas wilayah yang belum terselesaikan masih menjadi kendala nyata. “Kami sangat berharap RUU nanti mencantumkan peta wilayah secara jelas di lam-

piran, disertai titik koordinat sebagai penegasan cakupan wilayah,” katanya.

Di tengah upaya percepatan otonomi daerah dan penataan ulang wilayah, kejelasan hukum atas status administratif dan batas wilayah menjadi hal mutlak. RUU Kabupaten/Kota bukan hanya soal legalitas eksistensi, tapi juga menjadi rujukan penting bagi tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tanpa dasar hukum yang mutakhir, banyak potensi daerah yang tak bisa berkembang optimal.

Langkah Komite I DPD RI ini sekaligus mempertegas peran lembaga senator dalam memperjuangkan kepentingan daerah secara konkret. Dengan menghimpun suara langsung dari pemerintah daerah, DPD RI menunjukkan bahwa pembentukan hukum bukanlah proses yang eksklusif di pusat, melainkan hasil sinergi antara pusat dan daerah demi mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh pelosok negeri. (\*)

# Dari Daerah untuk Indonesia: Musrenbang Harus Menjadi Rujukan Nasional

Betria Eriani

Penulis

**K**omitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kali ini melalui Komite IV yang menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kamis (8/5/2025). Dalam forum ini, pembahasan fokus pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sekaligus menyoroti isu-isu aktual dan capaian kinerja triwulan pertama kementerian tersebut.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan, salah satu sorotan utama adalah ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah dalam RKP 2026. Isu ini tak bisa dilepaskan dari program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. “Ketahanan pangan ini sangat strategis, karena

menyangkut banyak aspek pembangunan, termasuk kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Nawardi kepada wartawan usai rapat.

Namun, di balik program-program nasional yang digagas pemerintah pusat, Komite IV DPD RI mengingatkan agar hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari daerah tidak hanya menjadi formalitas. Nawardi menyebut, hingga kini sudah 28 provinsi melaksanakan musrenbang, dan hasilnya harus benar-benar diakomodasi dalam musrenbang nasional yang akan digelar Juni mendatang. “Pembangunan Indonesia harus dimulai dari kepentingan daerah, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga provinsi selama ini menjadi ruang aspirasi utama bagi masyarakat. Sayangnya, tak jarang hasilnya terabaikan saat penyusunan kebijakan nasional.

Melalui raker ini, DPD RI ingin memastikan bahwa suara

dari bawah mendapat tempat dalam rencana pembangunan nasional. Nawardi mencontohkan, program-program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat seharusnya dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, bukan sekadar inisiatif pusat.

Rapat kerja ini juga menjadi panggung bagi para senator menyuarakan realitas dari daerah masing-masing. Mereka mengangkat persoalan beragam, mulai dari infrastruktur rusak, angka kemiskinan yang tinggi, kerusakan lingkungan, hingga krisis kesehatan seperti HIV/AIDS. Tak ketinggalan, isu ketimpangan upah dan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Suara-suara ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat di akar rumput.

Dari forum itu lahirlah sejumlah kesimpulan penting, salah satunya penegasan agar program-program nasional benar-benar dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan melibatkan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan. Bagi DPD RI, keberhasilan pembangunan nasional hanya bisa dicapai jika pusat dan daerah berjalan beriringan, saling mendengar, dan saling menguatkan. Karena sejatinya,

Indonesia yang kuat tumbuh dari daerah yang diberdayakan.

(\*)



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Suara Daerah Menggema di Senayan: Dari Morowali hingga Pidie

M. Fathoni

Penulis

Ruang rapat Komite IV DPD RI, Kamis (8/5/2025), menjadi saksi lantangnya suara dari daerah. Dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, para senator tak hanya membahas kerangka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, tetapi juga membawa keresahan nyata dari dapil mereka keluhan rakyat yang jarang terdengar di meja pusat.

Senator Andhika Amir dari Sulawesi Tengah membawa potret buram dari balik kilau industri nikel nasional. Di Bahodopi, Kabupaten Morowali, hilirisasi berjalan pesat, investasi mengalir deras, namun masyarakat setempat justru tertinggal. “Di tengah gemerlap industri, kami melihat kemiskinan,

kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga darurat HIV/

AIDS. Ini bukan hanya ironis, tapi juga alarm,” ungkapnya penuh keprihatinan.

Tak tinggal dalam kritik, Andhika pun menawarkan solusi konkret. Ia mendorong pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara. Lembaga ini, katanya, akan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, mengelola investasi secara terkoordinasi, memperbaiki layanan publik, dan memastikan masyarakat lokal menjadi subjek, bukan sekadar penonton di tengah geliat industri.

Dari ujung barat Indonesia, Senator Darwati Abdul Gani menyuarakan keresahan warga Pidie, Aceh. Ia mempertanyakan pemblokiran anggaran senilai Rp 59 miliar untuk perbaikan jalan nasional Tangse–Meulaboh. Jalan ini rusak parah karena dilalui truk-truk proyek Bendungan Rukoh. “Padahal jalan ini vital bagi warga. Mereka harus melintas di jalur rusak demi aktivitas harian. Ini sudah darurat,” tegas Darwati.

Senator asal Aceh itu tak sekadar mengeluh. Ia menuntut keadilan fiskal dan keberpihakan pembangunan-

an. Menurutnya, efisiensi anggaran pusat tak boleh mengorbankan akses dasar masyarakat daerah. Terlebih ketika proyek nasional justru menjadi penyebab rusaknya infrastruktur lokal. “Kalau pusat membangun bendungan, jangan biarkan rakyatnya berjalan di jalan yang hancur,” katanya tajam.

Rapat kerja itu pun menjadi lebih dari sekadar forum teknokratik. Ia menjelma menjadi ruang pertemuan antara visi pusat dan realita daerah. Sebuah pengingat bahwa pembangunan tak cukup hanya ditakar dari angka dan indikator, tapi harus dirasakan oleh mereka yang tinggal di sudut-sudut republik. Karena sejatinya, pembangunan yang berpihak adalah pembangunan yang mendengar. (\*)



Anggota DPD RI Andhika Amir  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Darwati Abdul Gani  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Pengelolaan SDA Masih Terpusat, Daerah Tak Rasakan Manfaat Optimal

Nanda Russia Rola

Penulis

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Dari hutan lebat, tambang mineral, hingga potensi energi yang melimpah, negeri ini seharusnya mampu memetik manfaat besar untuk kemakmuran seluruh rakyatnya. Namun, kenyataannya, pengelolaan SDA masih sangat terpusat di tangan pemerintah pusat. Akibatnya, daerah-daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan alam melimpah belum merasakan manfaat optimal, bahkan seringkali harus menanggung kerusakan lingkungan yang berat.

Elviana, anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Jambi, mengungkapkan keprihatinannya dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Ia menegaskan bahwa monopoli pengelolaan SDA oleh pusat tanpa memberi ruang kepada pemerintah daerah bisa membawa Indonesia ke ambang kegelapan, baik secara energi maupun lingkungan. “Indonesia terancam menghadapi kegelapan jika pemerintah pusat terus memonopoli pengelolaan sumber daya alam tanpa memberikan porsi yang adil kepada pemerintah daerah,” tegasnya.

Otonomi daerah sejatinya memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya secara mandiri. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak daerah yang menjadi “penonton” dalam pengelolaan SDA di wilayahnya sendiri. Elviana menegaskan bahwa tanpa keterlibatan dan kewenangan penuh dari daerah, pembangunan nasional berisiko menjadi tidak merata dan jauh dari cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusi.

Senator dari Jambi itu juga mengingatkan tentang dampak buruk yang sudah nyata dari pengelolaan SDA yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kasus kerusakan lingkungan



Anggota DP RI Elviana saat mengikuti rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Bappenas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

akibat aktivitas tambang ilegal dan deforestasi masif kerap terjadi tanpa pengawasan efektif dari daerah. Padahal, daerah adalah yang paling tahu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan mereka. “Berikanlah kepercayaan itu kepada daerah. Jangan semua dikendalikan dari pusat, sementara masyarakat di daerah justru menanggung kerusakan dan ketimpangan,” ujarnya penuh harap.

Selain itu, Elviana menyoroti ketimpangan kebijakan fiskal yang membuat daerah lebih sering diperlakukan sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Padahal, pembangunan yang berkeadilan harus melibatkan daerah dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis. Ia mendorong kementerian dan lembaga di pusat agar membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pembangunan jangka panjang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan daerah.

Masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara ini mengelola kekayaan alamnya secara adil dan berkelanjutan. Memberikan peran lebih besar kepada daerah bukan hanya soal keadilan, tapi juga kunci untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan menghindari krisis energi dan lingkungan. Pesan Elviana ini menjadi panggilan penting bagi pemerintah pusat untuk segera merevisi paradigma pengelolaan SDA demi kesejahteraan bersama. (\*)

# DPD RI Miliki Sekjen Baru, Mohammad Iqbal Siap Kerja Maksimal

Adhi Nugroho

Penulis

**G**edung Nusantara IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi panggung penting bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin (19/5/2025), ketika Ketua DPD RI Sultan B Najamudin secara resmi melantik Irjen Pol Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Rahman Hadi sebagai Sekjen DPD RI, yang kini mendapat kepercayaan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama. Pengangkatan Mohammad Iqbal didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2025 tertanggal 9 Mei 2025.

Mohammad Iqbal bukan figur asing dalam dunia kepemimpinan nasional. Dengan latar belakangnya sebagai perwira tinggi Polri dan pengalaman terakhirnya sebagai Kapolda Riau, Iqbal diyakini mampu membawa perspektif baru dalam mendukung kerja-kerja konstitusional lembaga senator. Keberadaannya di posisi strategis ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola internal dan meningkatkan efektivitas birokrasi di lingkungan DPD RI.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam sambutannya mengungkapkan harapan besar terhadap Sekjen baru. Ia menegaskan bahwa jabatan Sekjen merupakan posisi kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga. "Saya yakin, dengan dedikasi dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini, Saudara Iqbal akan mampu mengemban tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya," ujar Sultan dengan penuh keyakinan.

Sultan juga menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh unsur di lingkungan Setjen DPD RI dalam mendukung kepemimpinan Mohammad Iqbal. Ia menyebut, Sekretariat Jenderal adalah satu korps besar yang mengemban tanggung jawab bersama untuk menjadikan DPD RI semakin profesional dan responsif terhadap aspirasi



Mohammad Iqbal sedang menandatangani berita acara pelantikannya sebagai Sekjen DPD RI disaksikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

daerah. Sinergi, kolaborasi, dan loyalitas menjadi kunci sukses menghadapi tantangan ke depan.

Tak lupa, apresiasi tulus disampaikan kepada Rahman Hadi atas dedikasinya selama menjabat sebagai Sekjen sejak Desember 2020. Sultan menyebut kontribusi Rahman Hadi sangat berarti dalam proses penguatan lembaga, dan perannya sebagai analis legislatif ahli utama akan tetap membawa manfaat besar bagi DPD RI. "Pengalaman Saudara menjadi bekal penting dalam memberikan masukan strategis ke depan," ucap Sultan.

Usai pelantikan, Mohammad Iqbal menyampaikan rasa syukurnya dan berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekjen DPD RI. Ia mengungkapkan bahwa penugasan ini adalah amanah langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan dirinya akan fokus memberikan dukungan administratif serta keahlian sesuai dengan fungsi konstitusional DPD RI. "Saya akan bekerja maksimal di sini, menguatkan peran DPD RI melalui pelayanan yang profesional," tegas Iqbal di hadapan awak media.

Dengan semangat baru di level kepemimpinan Setjen, DPD RI memasuki babak baru penguatan kelembagaan. Penunjukan Mohammad Iqbal menjadi simbol transformasi organisasi menuju arah yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada hasil. Masyarakat daerah kini menaruh harapan besar pada DPD RI sebagai representasi mereka di pusat, dengan dukungan manajerial dan administratif yang lebih kuat di bawah kepemimpinan Sekjen baru. (\*)

Sewitri:

# Dari Pelalawan ke Parlemen: Kiprah Sewitri Menembus DPD RI

Adhi Nugroho

Penulis

**D**i tengah dominasi politik yang masih banyak didominasi kaum pria, kehadiran Sewitri sebagai satu-satunya perempuan yang mewakili Riau di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024–2029 memberikan warna tersendiri. Lahir di Pekanbaru pada 14 September 1981, Sewitri membawa latar belakang keluarga yang kental dengan nilai-nilai pendidikan dan keislaman. Ia adalah putri dari pasangan H M Harris, tokoh politik dan pengusaha asal Pelalawan, dan Hj Ratna Mainar, seorang guru. Lingkungan keluarga yang disiplin dan religius menjadikan Sewitri pribadi yang tangguh dan berprinsip.

Perjalanan pendidikan Sewitri dimulai dari SDN 007 Rumbai, dilanjutkan ke MTsN Darul Hikmah dan SMUN 1 Pekanbaru. Kecintaannya terhadap ilmu ekonomi membawanya ke Universitas Riau, tempat ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi. Tidak berhenti di situ, Sewitri juga melanjutkan studi Magister Ilmu Politik di Pascasarjana Universitas Riau. Perpaduan antara pendidikan ekonomi dan politik menjadi bekal penting bagi kiprah Sewitri di dunia pemerintahan dan legislatif.

Karier politik Sewitri dirintis

dari bawah. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

Dalam perjalanan itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Riau, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Pelalawan, serta Wakil Ketua DPD Partai Golkar Riau. Melalui lembaga yang ia dirikan, Yayasan Harmoni Riau Sejahtera, Sewitri aktif memberdayakan perempuan, anak muda, dan komunitas masyarakat akar rumput.

Pada Pemilu 2024, Sewitri tampil sebagai calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau. Ia berhasil mencatatkan perolehan suara yang signifikan, menempatkannya di posisi tiga besar dengan lebih dari 100 ribu suara. Kepercayaan yang besar dari masyarakat Riau ini menjadi modal politik sekaligus amanah yang ia bawa saat resmi dilantik sebagai anggota DPD RI. Kini, ia duduk di Komite III DPD RI yang membidangi isu-isu kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Sebagai senator, Sewitri mengusung berbagai rencana strategis untuk memperjuangkan kemajuan Riau. Ia fokus mendorong kolaborasi multipihak dalam pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana. Salah satu

langkah konkretnya adalah menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah wilayah Riau. Selain itu, ia juga mendukung wacana menjadikan Riau sebagai daerah istimewa, bukan semata karena pertimbangan politik, tetapi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Riau terhadap bangsa.

Kiprah Sewitri tak lepas dari semangatnya memberdayakan perempuan dan generasi muda. Sebagai tokoh perempuan di legislatif, ia ingin menjadi inspirasi dan representasi perempuan Riau dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Ia percaya, masa depan daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan pengalaman politik yang matang dan kepedulian sosial yang tinggi, Sewitri menegaskan komitmennya: menjadi suara rakyat

Riau yang lantang di Senayan. (\*/berbagai sumber)



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Bisri As Shiddiq Latuconsina:

# Suara Baru dari Tanah Maluku

**Adhi Nugroho**

Penulis

**D**i tengah riuhnya panggung politik Indonesia, nama Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos. hadir sebagai representasi segar dari generasi muda Maluku. Lahir dan besar di Ambon, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah maritim, Bisri tumbuh dengan kesadaran kuat akan pentingnya menjaga identitas daerah dalam arus globalisasi. Ia bukan hanya politisi, tapi juga sosok yang memahami denyut nadi masyarakat kepulauan dari pulau-pulau kecil hingga pusat kota.

Terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024–2029, Bisri membawa suara lebih dari 110 ribu pemilih yang mempercayakan masa depan Maluku padanya. Suara ini bukan hanya angka, tapi bukti bahwa rakyat menginginkan perubahan lebih transparan, lebih progresif, dan lebih dekat dengan rakyat. Dengan duduk di Senayan, ia menjadi jembatan antara suara rakyat di timur Indonesia dengan kebijakan nasional yang sering kali terlalu Jawa-sentris.

Sebagai senator, Bisri aktif mengampanyekan

pentingnya Empat Pilar Kebangsaan, sebuah misi yang ia bawa ke kampus-kampus dan komunitas, termasuk dalam kegiatan bersama mahasiswa di STIA Alazka Ambon. Dalam tiap forum, ia tak hanya berbicara sebagai politisi, tapi juga sebagai anak daerah yang ingin nilai-nilai Pancasila tidak berhenti di buku pelajaran tetapi hidup dalam tindakan, dalam kebijakan, dan dalam perilaku publik.

Kehadiran digital menjadi salah satu keunggulan Bisri. Di era ketika politik semakin dekat dengan media sosial, ia memanfaatkan platform seperti Instagram untuk menyampaikan aktivitas, berdialog langsung dengan masyarakat, hingga menampilkan kesehariannya sebagai wakil rakyat. Transparansi dan keterbukaan menjadi gaya komunikasinya sebuah pendekatan yang cocok dengan generasi muda yang haus akan kejujuran dan keautentikan.

Namun di balik semua itu, Bisri tetap membumi. Ia masih menjadi bagian dari komunitas Ambon yang hangat, religius, dan menjunjung tinggi gotong royong. Silaturahmi dengan tokoh agama, kunjungan ke desa-desa, serta keterlibatannya

dalam kegiatan adat dan budaya, memperkuat posisinya bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai lokal yang tak tergantikan oleh modernitas.

Dengan langkah yang tenang tapi pasti, Bisri As Shiddiq Latuconsina menapakinya sebagai senator muda dari timur Indonesia. Ia membawa harapan bahwa Maluku tak akan lagi menjadi sekadar catatan kaki dalam perumusan kebijakan nasional, tetapi menjadi pusat suara yang jernih tegas namun santun, keras namun bijak seperti ombak di pesisir Ambon yang tak pernah berhenti bersuara. (\*/berbagai sumber)



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.M.

# Dari Bhayangkara ke Birokrasi

Nanda Russia Rola

Penulis

**K**omjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.M., resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) setelah dilantik oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin pada 19 Mei 2025. Penempatan ini merupakan bentuk penugasan resmi dari Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2025. Meski datang dari latar belakang kepolisian, Iqbal dipercaya dapat menghadirkan nuansa baru dalam pengelolaan birokrasi DPD RI, berkat kepemimpinannya yang dikenal progresif, tegas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 4 Juli 1970, Mohammad Iqbal menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Ia merupakan alumnus SMA Negeri

1 Palembang angkatan 1988. Ketertarikannya pada dunia ketertiban dan hukum membawanya melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian (Akp) di Semarang, dan lulus pada tahun 1991. Dari sanalah perjalanan panjangnya sebagai Bhayangkara dimulai, dengan penugasan pertamanya sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin, Polda Kalselteng pada 1992.

Kariernya terus menanjak dengan kepercayaan yang ia emban di berbagai daerah. Ia pernah menjabat sebagai Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin (1993), Kapolres Gresik (2009), Kapolres Sidoarjo (2010), Kapolres Metro Jakarta Utara (2013), dan Kapolrestabes Surabaya (2016). Reputasi komunikatif dan profesionalnya mengantarkan Iqbal ke Mabes Polri sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri pada 2017, sekaligus promosi pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Tahun-tahun berikutnya ia terus menunjukkan kapasitasnya hingga dipercaya menjadi Kadiv Humas Polri dan meraih pangkat Inspektur Jenderal.

Puncak karier operasionalnya terjadi saat Iqbal menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (2020–2021) dan Kapolda Riau (2021–2025). Di Riau, ia dikenal sebagai pemimpin yang agresif dalam pemberantasan narkoba dan korupsi. Selama masa tugasnya, Polda Riau berhasil menyita lebih dari 2,4 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi dari jaringan internasional.

Ia juga turut membongkar kasus SPPD fiktif di DPRD Riau yang merugikan keuangan negara hingga Rp160 miliar. Tak hanya represif, Iqbal juga aktif dalam penanganan bencana dan kegiatan sosial di daerah-daerah terdampak banjir dan kebakaran lahan.

Di luar kiprah lapangan, Iqbal juga dikenal sebagai perwira tinggi yang menekankan pentingnya komunikasi publik, kolaborasi lintas lembaga, dan integritas dalam birokrasi. Pendidikan lanjutannya meliputi program Magister Manajemen (M.M.) yang ia tempuh sembari berdinastis, menunjukkan dedikasi terhadap pengembangan diri dan wawasan kelembagaan. Dengan latar belakang tersebut, penempatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI bukan hanya simbol sinergi antar-lembaga, tapi juga langkah strategis memperkuat fungsi administratif DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah.

Dengan menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi dan pengalaman tiga dekade lebih di jajaran Polri, Iqbal memasuki arena baru yang menantang: reformasi birokrasi parlemen. Ia membawa visi menjadikan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai lembaga yang profesional, adaptif, dan proaktif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Baginya, tugas baru ini adalah amanah negara yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan inovasi, demi pengabdian yang tak putus untuk rakyat dan republik. (\*)



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Badui: Melestarikan Tradisi di Tengah Arus Modernisasi



Suku Badui Dalam, kemana-mana harus jalan kaki. Baju dan ikat kepala warna putih. (Foto AntNews)

**Arso P Nugroho**

Penulis

**S**uku Badui, yang tinggal di wilayah pegunungan Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya dengan sangat kuat di tengah arus modernisasi yang kian deras. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Badui Dalam dan Badui Luar, yang masing-masing memiliki tingkat keterbukaan berbeda terhadap dunia luar. Badui Dalam memilih hidup sangat tertutup dan menjaga adat-istiadat leluhur dengan ketat, sementara Badui Luar mulai sedikit membuka diri terhadap perubahan dan interaksi dengan masyarakat umum.

Keunikan suku Badui terletak pada ketaatan mereka terhadap ajaran leluhur yang melarang segala bentuk teknologi modern, termasuk penggunaan kendaraan bermotor, listrik, dan alat komunikasi elektronik. Dalam keseharian, mereka masih menggunakan pa-

kaian tradisional yang sederhana, alat transportasi berjalan kaki, serta bercocok tanam dengan metode tradisional. Adat istiadat ini bukan hanya soal cara hidup, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap alam dan keyakinan spiritual yang mengikat seluruh anggota komunitas.

Meski demikian, perkembangan zaman tidak sepenuhnya luput dari pengaruh suku Badui. Khususnya kelompok Badui Luar, mulai berinteraksi dengan dunia luar, menerima kunjungan wisatawan, dan menjual hasil pertanian serta kerajinan tangan. Hal ini membuka peluang ekonomi baru yang memberi mereka tambahan penghasilan tanpa harus melepaskan jati diri dan nilai-nilai tradisional secara keseluruhan. Namun, perubahan ini tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keseimbangan antara tradisi dan kemajuan tetap terjaga.

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian pemerintah dan akademisi mulai tertuju pada suku Badui sebagai warisan budaya yang harus dilindungi.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Badui melalui pelestarian hutan dan pendampingan sosial ekonomi. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dari tekanan ekonomi dan keinginan generasi muda untuk menyesuaikan diri dengan dunia modern. Meskipun demikian, kesadaran kolektif masyarakat Badui terhadap pentingnya mempertahankan warisan leluhur tetap menjadi penguat utama komunitas ini.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya keseimbangan baru yang mulai terbentuk antara tradisi dan perubahan. Badui Luar yang lebih terbuka menjadi jembatan antara Badui Dalam dan masyarakat luar, sekaligus sebagai penjaga agar modernisasi tidak menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal. Pariwisata berkelanjutan mulai dikembangkan dengan mengedepankan etika dan penghormatan terhadap adat, sehingga pengunjung dapat belajar dan menghargai kehidupan suku Badui tanpa mengganggu keharmonisan mereka.

Suku Badui hingga kini tetap menjadi simbol kuat dari keberhasilan menjaga identitas dan kelestarian budaya di tengah globalisasi. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, menjaga tradisi tanpa menutup kemungkinan beradaptasi, dan betapa nilai-nilai sederhana dapat menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Kisah suku Badui bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan dalam menjaga harmoni antara kemajuan dan budaya. (\*/berbagai sumber)

## Badui: Preserving Tradition Amid Current of Modernization



The Outer Badui tribe, dressed in black clothing and blue batik. (Photo by RRI)

**Arso P. Nugroho**

Writer

**N**estled in the highlands of Lebak Regency, Banten Province, Indonesia, Badui Tribe represents one of the most resilient indigenous communities. Their unwavering commitment to ancestral traditions has kept their way of life largely untouched by the sweeping current of modernization. The community is divided into two primary groups: The Inner Badui and the Outer Badui, which respectively has its distinct degree of openness toward outside world. The inner one chooses tight isolation and preserving its ancestral tradition closely, while the outer one begins slightly opening itself toward changes and interaction with the public.

The Badui's uniqueness lies in their deep reverence for ancestral wisdom, which prohibits all forms of modern technology such as the use of motor vehicles, electricity, and electronic devices. The community dresses

in simple traditional garments, travels only on foot, and practices traditional agriculture. The traditions are not just way of life, but also an expression of respect and spiritual belief which binds the community.

Nevertheless, the influence of modernization is not fully evicted from the Badui. The outer Badui in particular begins interacting with outsiders by accepting tourists and selling agricultural products and handicrafts. This has opened new economic opportunity that provides them with additional income without having to abandon their authentic identity and overall traditional values. However, the changes still have to be entered cautiously in order to preserve the balance between tradition and advancement.

In the past few decades, the attention of the government and academia begins to focus on Badui tribe as cultural heritage that must be preserved. Various endeavors are done to preserve Badui's environ-

ment and culture through forest conservation and social economic mentoring. Yet, big challenges remains, primarily from economic pressure and the yearning of younger generation to be in touch with modernization. Nonetheless, the Badui's collective conscience of the importance of ancestral heritage preservation remains the essential bound of the community.

Latest development indicates the forming of new equilibrium between tradition and changes. The outer Badui, which is more open, bridges the Inner tribe to the outside world and serves as keeper against potentially harming modernization to their local wisdom and values. Sustainable eco-tourism begins to be developed, upholding ethics and respects toward traditions, so that visitors can learn and appreciate the life of the Badui without disturbing their harmony.

Badui Tribe remains to be a strong symbol of success to keeping identity and culture preservation in amidst of modernization. They teach us the importance of living harmoniously with nature, keeping traditions without closing adaptation possibility, and appreciating simple values as firm foundation in facing the challenge of times. The story of Badui tribe is not only about past history, but it also is an inspiration for the future on how to keep the harmony between modernization and culture. (\*various sources)



# Danau Ranau, Lukisan Alam yang Memikat Hati



Danau Ranau (Foto Travel Kompas)

**Nanda Russia Rola**

Penulis

**D**anau Ranau adalah permata alam yang membentang di perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan luas sekitar 125,9 kilometer persegi, danau ini menjadi danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan lembah subur, Danau Ranau menawarkan pemandangan yang memesona, udara sejuk yang menyegarkan, serta ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Keindahan alamnya yang masih alami menjadikan danau ini surga tersembunyi bagi para pencinta wisata alam.

Salah satu daya tarik utama Danau Ranau adalah latar belakang Gunung Seminung yang menjulang gagah di tepinya. Refleksi gunung di permukaan danau yang tenang menciptakan panorama yang

memukau, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Warna langit yang berubah-ubah berpadu dengan kabut tipis yang menggantung di atas air, menghasilkan suasana magis yang sulit dilupakan. Banyak wisatawan sengaja datang di pagi atau sore hari hanya untuk menikmati momen keemasan ini.

Tak hanya pemandangannya yang indah, Danau Ranau juga kaya akan sumber air panas alami. Salah satu lokasi yang populer adalah Pemandian Air Panas Way Kalam, yang terletak di salah satu sisi danau. Di sini, pengunjung dapat merasakan sensasi berendam di air hangat alami sambil menikmati pemandangan danau yang menenangkan. Air panas ini dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan, menambah daya tarik Danau Ranau sebagai destinasi wisata yang lengkap.

Bagi pecinta petualangan, Danau Ranau menawarkan

beragam aktivitas seru seperti berenang, berperahu, memancing, hingga trekking ke Gunung Seminung. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk lebih dekat dengan alam, menyatu dengan keindahan dan ketenangan danau. Selain itu, desa-desa di sekitar danau seperti Desa Lumbok dan Desa Banding Agung menawarkan suasana pedesaan yang ramah, lengkap dengan budaya lokal yang masih kental.

Budaya masyarakat sekitar Danau Ranau juga menjadi pesona tersendiri. Tradisi-tradisi lokal, kerajinan tangan, serta kuliner khas seperti ikan mujair bakar dan pepes ikan segar menjadi pelengkap pengalaman wisata di sini. Penduduk yang hangat dan bersahaja membuat siapa pun merasa diterima, menambah kesan bahwa Danau Ranau bukan sekadar tempat berlibur, tetapi juga tempat untuk menemukan ketenangan hati.

Dengan keindahan alamnya yang megah, kekayaan budaya lokal, serta suasana yang damai, Danau Ranau menjadi destinasi yang layak dikunjungi bagi siapa saja yang mencari pelarian dari hiruk pikuk kehidupan modern. Entah itu untuk sekadar menikmati pemandangan, berpetualang di alam, atau meresapi kehangatan budaya setempat, Danau Ranau menawarkan pengalaman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyentuh jiwa.

(\* /berbagai sumber)

# Lake Ranau, A Fascinating Nature Painting

Nanda Russia Rola

Written

**L**ake Ranau is a natural gem that stretches across the border of South Sumatra and Lampung. Covering an area of approximately 125.9 square kilometers, it is the second largest lake on the island of Sumatra after Lake Toba. Surrounded by green hills and fertile valleys, Lake Ranau offers breathtaking views, refreshing cool air, and rare tranquility that is hard to be found elsewhere. Its pristine natural beauty makes the lake a hidden paradise for nature lovers.

One of the main attractions of Lake Ranau is Mount Seminung background towering majestically by its shores. The reflection of the mountain on the calm surface of the lake creates a stunning panorama, especially during sunrise or sunset. The changing colors of the sky blend with the thin mist hanging over the water, producing an memorable magical atmosphere. Many tourists intentionally come early in the morning or at dawn just to enjoy these golden moments.

Not only for its scenic view, but Lake Ranau is also rich in natural hot springs. One of the popular locations is the Way Kalam Hot pool, located on one side of the lake. Here can



Ranau Lake (Foto detikcom)

visitors enjoy the sensation of wallowing in the natural warm water while enjoying the scenic serenity of the lake. The hot water is believed to have health benefits, adding to the attraction of Lake Ranau as a complete tourist destination.

For adventure enthusiasts, Lake Ranau offers a variety of exciting activities such as swimming, boating, fishing, and trekking to Mount Seminung. These activities prompt visitors with the opportunity to get closer to nature and immerse themselves in the beauty and serenity of the lake. Additionally, the surrounding villages, such as Lumbok and Banding Agung, offer a friendly rural atmosphere, complete with thick local culture.

The culture of the community around Lake Ranau is uniquely charming too. Local

traditions, handicrafts, and typical culinary dishes like grilled tilapia and steamed fresh fish complement the overall experience of visiting here. The warm and simple locals make everyone feel welcome, adding to the impression that Lake Ranau is not just a vacation spot, but also a place to find peace of mind.

With its majestic natural beauty, rich local culture, and peaceful atmosphere, Lake Ranau is a destination worth visiting for anyone looking for an escape from the hustle and bustle of modern life. Whether simply enjoying the views, taking on an adventure in nature, or immersing oneself in the warmth of local culture, one will find that Lake Ranau offers an experience that does not only please the eyes but also touches the soul.

(\*various sources)

# Danau Kaco: Biru, Misterius, Bikin Penasaran!



(Foto kabarjambikito)

**Lela Sadiyah**

Penulis

**B**ayangkan kita lagi jalan-jalan di tengah hutan, terus tiba-tiba nemu danau sebening kaca, warnanya biru terang kayak neon. Itulah Danau Kaco permata tersembunyi di Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Lokasinya ada di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Meski harus susah payah buat sampai ke sana, tapi begitu lihat danau-nya... semua capek langsung hilang!

Perjalanan ke Danau Kaco itu kayak masuk film petualangan. Dari Kota Sungai Penuh, kita bisa naik

kendaraan sekitar dua jam ke Desa Lempur. Setelah itu, trekking 3-4 jam lewat hutan tropis yang masih asli banget. Jalanannya penuh akar, suara burung liar, dan aliran sungai kecil yang bikin adem. Tapi pas udah deket danau, warna birunya langsung menyambut. Jernih banget, bisa ngaca di atas air!

Nggak cuma cantik, Danau Kaco juga penuh misteri. Kata warga lokal, danau ini dijaga makhluk halus dan jadi tempat penyimpanan harta kerajaan kuno. Malam-malam saat bulan purnama, danau ini bisa nyala sendiri. Serius! Cahaya biru dari dalam air

kayak pakai lampu LED alami. Katanya sih dari batu permata yang ada di dasar danau.

Secara ilmiah, cahaya itu belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Ada yang bilang karena kandungan mineral unik di airnya. Lebih bikin penasaran, sampai sekarang belum ada yang tahu pasti seberapa dalam danau ini. Beberapa penyelam bilang: "Kami nggak nemu dasarnya." Jadi makin misterius, kan?

Selain Danau Kaco, kamu bisa sekalian eksplor hutan di sekitarnya. Taman Nasional Kerinci Seblat punya banyak satwa langka, kayak harimau Sumatra dan burung enggang. Warga Lempur juga ramah-ramah. Mereka siap nyediain *home-stay*, makanan enak khas Kerinci, dan cerita-cerita lokal yang bikin kamu makin jatuh cinta sama tempat ini.

Kalau kamu suka petualangan yang beda dari yang lain, Danau Kaco wajib masuk *bucket list*. Ini bukan cuma soal traveling, tapi soal nyatu sama alam, mitos, dan pengalaman yang nggak semua orang punya. Karena tempat keren itu bukan yang paling hits, tapi yang paling ngena di hati. Dan Danau Kaco? *Fix* ngena banget! (\*/berbagai sumber)

# Danau Kaco: Blue, Mysterious; Totally Intriguing!



(Foto kabarjambikito)

**Lela Sadiyah**

Written

**I** imagine yourself hiking through a dense forest, and suddenly, you come across upon a crystal-clear lake glowing in electric blue. That's Danau Kaco—a hidden gem tucked away in Kerinci Seblat National Park, Jambi, Indonesia. It is located in Lempur Village, Kerinci Regency. Despite the effort to reach the place, the moment you see the lake... all exhaustion gone in an instant.

Getting into Danau Kaco feels like stepping into an adventure movie. From Sungai

Penuh City, it's a two-hour drive to Lempur Village. Then comes a 3-4 hour jungle trekking through virgin rainforest. The path is full with roots, bird song, soothing sound of small streams. And when the lake finally comes into view, the glowing blue water welcomes you. It's so clear, you can literally see your reflection!

But Danau Kaco isn't just beautiful—It is mysterious too. Locals believe it's guarded by supernatural beings and a hidden vault of ancient kingdom's treasure. On full moon nights, the lake is said to glow. No joke! A soft, bluish light flashes from

beneath the surface like it's powered by natural LED. They say it's from gemstones lay in the lake bed.

Scientifically, the glow can't be explained fully. Some suggest it could be due to peculiar mineral content within the water. More intriguingly, till today no one really knows the depth of the lake. Some divers have reported, "We couldn't reach the bottom." Getting more mystifying, isn't it?

Besides the lake, you can explore the surrounding jungle as well. Kerinci Seblat National Park is home to many near-extinct fauna, such as Sumatran tigers, hornbills, and rare tropical plants. The people of Lempur are warm and welcoming. You can stay in a homestay, try local Kerinci dishes, and hear fascinating stories which make you be deeper in love with the place.

If you're into unique adventures. Danau Kaco belongs to your bucket list. It's not just about travelling—it's more about connecting with nature, myths, and rare experience not every one possesses. As the coolest destinations aren't always the most popular ones but the one that touches your heart. And Lake Kaco? Definitely unforgettable.

(\* /from various sources)

# Bagea, Makan Khas Maluku yang Keras tapi Lembut di Mulut

Nanda Russia Rola

Penulis

**D**i balik suara ombak yang memecah pantai di Ambon dan desir angin dari pohon-pohon kenari tua, ada satu kue yang selalu hadir dalam setiap musim, setiap upacara, dan setiap cangkir teh sore: bagea. Kecil, bulat, bertekstur keras di luar bagea bukan sekadar kue. Ia adalah kenangan. Ia adalah ingatan kolektif orang Maluku yang terekam dalam adonan sagu dan serpihan kenari, diwariskan dari ibu ke anak, dari nenek ke cucu.

Bagea lahir dari keuletan masyarakat Maluku mengolah apa yang tersedia di tanah mereka. Di wilayah yang subur oleh rempah-rempah dan pohon kenari, bagea menjadi simbol bagaimana rasa bisa tumbuh dari kesederhanaan. Tepung sagu yang dulu dianggap makanan orang pedalaman dicampur dengan kenari tumbuk, kayu manis, cengkeh, dan gula merah. Dibentuk bulat pipih lalu dipanggang pelan-pelan di tungku batu. Hasilnya: kue padat, beraroma rempah, yang meletupkan rasa begitu menyentuh lidah.

Tapi jangan buru-buru memakannya. Bagea bukan untuk tergesa. Ia keras di awal seolah mengajak kita sabar, menunggu, dan meresapi. Biasanya dinikmati dengan teh panas atau kopi tubruk khas rumah-rumah di Ambon. Saat bagea menyerap hangatnya air, teksturnya melunak, rasanya pun berubah: dari keras menjadi kenyal, dari hambar menjadi dalam. Sebuah pengalaman makan yang sederhana tapi filosofis seperti orang Maluku sendiri.

Di banyak rumah, bagea juga punya makna spiritual. Ia disuguhkan saat acara syukuran, acara adat, bahkan prosesi keagamaan. Di sana, kue ini bukan cuma camilan tapi bagian dari ritus, bagian dari “hidangan jiwa” yang mengikat manusia dengan leluhurnya.



(foto Dapur mak Mona)

Bahkan dalam beberapa budaya lokal, bagea disusun rapi dalam nampan, dijadikan hantaran pernikahan, melambangkan kekuatan, ketahanan, dan rasa manis yang datang setelah perjuangan.

Zaman boleh berubah, supermarket boleh dibanjiri snack instan dan biskuit luar negeri, tapi bagea tetap punya tempat. Kini banyak UMKM di Maluku mulai memodernisasi tampilannya: dikemas cantik, diberi sentuhan rasa modern seperti coklat atau vanilla, namun tetap mempertahankan resep dasar yang turun-temurun. Anak muda pun mulai membagikan konten cara membuat bagea di TikTok atau *YouTube* sebuah upaya manis menjaga nyala tradisi lewat layar digital.

Bagea mengajarkan kita tentang waktu, kesabaran, dan warisan. Bahwa tidak semua yang keras itu dingin, dan tidak semua yang sederhana itu biasa. Dalam tiap gigitan bagea, ada tanah Maluku yang bicara pelan, tenang, namun dalam. Sebuah rasa yang tidak bisa diburu-buru, seperti cinta yang harus dinikmati perlahan. (\*/berbagai sumber)

# Bagea: A Traditional Maluku Delight That's Tough but Tender in Mouth

Nanda Russia Rola

Written

**B**eyond the crashing sound of waves along Ambon's shores and the whispering breeze through old canary trees, is a cookie ever-present in every season, every event, every quiet cup of afternoon tea: bagea. Small, round, with tough texture outside, bagea is more than just a snack. It's memory, sealed in sago and chopped kenari nuts, passed down from mother to child, from grandmother to granddaughter.

Bagea was born from the resilience of the Maluku people cooking with what the land could offer. In a region rich with spices and canary trees, this cookie became a symbol of how flavor can grow out of simplicity. Sago flour—once considered the food of the rural and remote—is mixed with crushed kenari, cinnamon, cloves, and palm sugar. It's molded into flat rounds, then slowly baked over traditional stone ovens. The result is a solid, spicy-aromatic cookie that spoils its savor when touches the tongue.

But don't rush it. Bagea isn't for rush. It's firm at first as if it's asking you to be patient, await, and absorb. Usually accompanied with hot



(Foto cookpad.com)

tea or typical black coffee in Ambon households. As bagea absorbs the warm liquid, its texture softens and its taste changes: from tough to chewy, from plain to rich. It's a simple eating experience but philosophical, like the people of Maluku themselves.

In many households, bagea also implicates spiritual meaning. It's served during thanksgiving events, religious ceremonies, and traditional rites. Therein, the cookie isn't just food—it's a ritual offering, part of a sacred table that connects the living with their ancestors. In some local customs, bagea is neatly arranged in a tray to be served as marriage offerings, symbolizing strength, endurance, and the subtle sweetness that follows life's struggles.

Times may change, super-

market aisles are flooded with instant snacks and international biscuit, bagea holds its place. Across Maluku, small medium enterprises modernize its presentation: attractive packaging, infusing it with modern flavors like chocolate and vanilla, yet staying true to its generational basic recipe. Young people are sharing how to make it on TikTok or YouTube a sweet endeavor to keep the flame of traditional torch through digital platform.

Bagea teaches us about time, patience, and heritage. That not everything hard is cold, and not everything simple is ordinary. In every bite of bagea, the soil of Maluku whispers quietly, steadily and profoundly. A taste that refuses to be rushed, like a love best expressed gradually. (\*)

# Jagung Titi, Kriuk Warisan Tanah Lontar



(Foto pariwisataindonesia)

**Lela Sadiyah**

Penulis

**D**i hampan kering dan berbatu pulau Flores, di antara desir angin panas dan bayangan pohon lontar yang menjulang, ada satu bunyi khas yang menandai waktu istirahat atau obrolan santai di sore hari: kriuk... kriuk... dari jagung titi. Bukan sembarang cemilan, jagung titi adalah kisah panjang tentang ketekunan, kreativitas, dan kedekatan manusia NTT dengan alam sekitarnya. Sebuah kuliner yang lahir dari ladang-ladang kering, namun penuh rasa.

Jagung titi tidak digoreng, tidak dibakar. Ia “dititi” ditumbuk secara presisi setelah disangrai di atas wajan tanah liat. Butiran jagung panas ditaruh satu-

persatu di atas batu datar, lalu dipukul dengan batu pipih hingga mekar seperti popcorn pipih alami. Tanpa minyak, tanpa tambahan apa pun. Hanya jagung, panas, dan ketelatenan tangan-tangan perempuan Ende atau Lembata yang sudah terbiasa membaca tekstur dari generasi ke generasi.

Rasanya sederhana tapi menenangkan gurih, renyah, dan penuh rasa bumi. Ini bukan jajanan yang dirancang pabrik, tapi kudapan yang diciptakan oleh alam dan dilestarikan oleh waktu. Biasanya dinikmati begitu saja, atau ditemani kopi hitam lokal yang pahit, duduk di bale-bale bambu, bercengkerama dalam bahasa daerah, diiringi bunyi angin yang menyusup masuk lewat din-

ding anyaman.

Di balik kelezatannya, jagung titi adalah bentuk adaptasi cerdas. Di daerah di mana beras tidak mudah tumbuh, jagung menjadi makanan pokok yang diolah dalam berbagai bentuk. Jagung titi adalah bukti bahwa kekurangan bukan hambatan untuk menciptakan sesuatu yang enak bahkan ikonik. Di banyak rumah adat, jagung titi juga disajikan sebagai tanda penghormatan bagi tamu, simbol keramahan dan kebanggaan akan budaya sendiri.

Kini, jagung titi telah keluar dari desa-desa kecil di NTT dan mulai mengisi rak-rak oleh-oleh di kota-kota besar. Dikemas modern, diberi label, bahkan dijual daring. Tapi meskipun tampilannya berubah, esensi jagung titi tetap sama: makanan yang lahir dari tangan yang sabar, dan tanah yang keras tapi penuh kasih. Sebuah camilan yang tak hanya mengisi perut, tapi juga menghangatkan hati.

Dan seperti filosofi hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur, jagung titi mengingatkan kita: bahwa yang sederhana bisa jadi istimewa, bahwa dari keterbatasan bisa tumbuh warisan, dan bahwa rasa seperti kenangan tak butuh mewah untuk mengendap dalam. (\*/berbagai sumber)

# Titi Corn: A Crunchy Legacy from the Land of Lontar



(Foto pariwisataindonesia)

**Lela Sadiyah**

Written

**O**n an arid stony expanse of Flores, between the whining dry wind and the shadow of towering lontar trees, resonates a typical sound that marks afternoon rest and chat: crunch ... crunch ... of Titi corn. Not just an ordinary snack, Titi corn is a long story of perseverance, creativity and intimacy between the people of East Nusa Tenggara (NTT) and the surrounding nature. A culinary delight which was born in arid fields, yet rich in taste.

Titi corn isn't fried, nor is it baked. It's "titi-ed"—precisely crushed after hav-

ing been roasted on a clay pot. Each hot corn kernel is placed to a flat stone and smashed with a smooth stone until it becomes flat like a natural flat popcorn. Neither oil nor seasoning is added. Just Corn kernel, heat, and painstakingly skillful hands of Ende's or Lembata's women who are so used to reading the texture from generation to generations.

Its taste is modest yet soothing—tasty, crispy and earthy. It's not a fabricated snack, but a nature-made and time-preserved one. It's usually enjoyed as is or accompanied by bitter local black coffee, black coffee, while sitting on a bamboo mat, chit-chatting in the

local tongue, accompanied by wind-blow sneaking in through the woven palm-leaf wall.

Beyond its savor, Titi corn is the product of smart adaptation. In a region where rice could hardly grow, corn became the staple which is processed into countless edible forms. Titi corn is a prove that scarcity is not a hindrance to producing something delicious and iconic. In many traditional homes, it is even served to guests as a gesture of honor; a symbol of hospitality and pride in one's roots.

Today, Titi corn has found its way beyond small villages in NTT and has begun filling gift shelves in major cities. It's been modernly packaged, labelled and even sold online. Regardless the appearance, the essence remains the same: a snack born from patient hands from a hard yet loving soil. A snack that does not only fill the belly, but also warms the heart.

As the life philosophy of NTT community, Titi corn reminds us: simplicity can be special, from scarcity can grow a heritage, and memorable feeling doesn't require extravagance to get deeply rooted. (\*/various source)

# DARI PARIS KE NUSANTARA, MEWUJUDKAN KOMITMEN PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM

Oleh:

Nanda Puspita/Analisis Legislatif Ahli Muda, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi wacana global, tetapi telah menjelma menjadi realitas lokal yang berdampak nyata terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, ketidakpastian pola musim, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air, dampak perubahan iklim semakin meluas, bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Sebagai wujud respons terhadap kondisi tersebut, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Namun, jelang satu dekade sejak pengesahan tersebut, Indonesia belum memiliki kerangka hukum nasional yang secara substansial dan sistematis mengatur pengelolaan perubahan iklim secara menyeluruh.

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi instrumen krusial untuk menjembatani kesenjangan antara mandat internasional dalam Paris



Agreement dan realitas pengelolaan iklim di dalam negeri. Hingga saat ini, kerangka hukum Indonesia dalam pengelolaan perubahan iklim masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang bersifat fragmen-taris. Instrumen kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan dokumen strategi seperti *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) serta *Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 telah menjadi pijakan penting dalam upaya nasional menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, belum ada dari perangkat kebijakan tersebut yang memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang yang menjamin kepastian pelaksanaan, konsistensi lintas sektor, serta akuntabilitas dalam

implementasi di tingkat pusat maupun daerah.

Ketiadaan payung hukum utama yang eksplisit dalam bentuk undang-undang menyebabkan pengelolaan perubahan iklim kerap dihadapkan dengan persoalan koordinasi kelembagaan yang lemah, perbedaan prioritas antar kementerian dan lembaga, serta keterbatasan dalam integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap lambatnya pencapaian target penurunan emisi, terbatasnya dukungan fiskal yang terarah, serta minimnya partisipasi publik dan dunia usaha dalam agenda transisi menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim.

Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI memiliki peran strategis dalam memperkuat dimensi lokal dari komitmen global tersebut. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang diusulkan oleh DPD RI memberi ruang bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK), mendorong alokasi pembiayaan iklim yang adil, serta mengatur peran masyarakat lokal dan adat yang selama

ini berada di garda depan dalam pelestarian hutan dan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Paris Agreement yang menekankan *inclusive participation, equity, dan capacity building* bagi negara berkembang.

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional. Dalam berbagai pertemuan COP (*Conference of Parties*), negara-negara berkembang seperti Indonesia diharapkan tidak hanya

menunjukkan komitmen angka, tetapi juga kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas. Undang-undang nasional tentang pengelolaan perubahan iklim akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi, khususnya terkait pendanaan, teknologi, dan

akses ke pasar karbon internasional yang kini mulai berkembang.

Dalam kondisi global yang semakin menempatkan isu iklim sebagai parameter utama kerja sama internasional, daya saing ekonomi, serta kelayakan investasi, Indonesia tidak dapat menunda lagi pembentukan kerangka hukum nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan progresif dalam pengelolaan perubahan iklim.

Kehadiran RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan dapat menjawab tuntutan global tersebut melalui sejumlah terobosan normatif yang antara lain mencakup penerapan kelembagaan pengendalian iklim, pengakuan atas hak masyarakat rentan dan

adat, penguatan mekanisme pembiayaan iklim, serta pengaturan sistem perdagangan karbon domestik dan internasional.

Tanpa didukung oleh kerangka hukum nasional yang memadai, ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 berpotensi menjadi sekadar komitmen simbolik yang tidak menjelma dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat nasional maupun daerah. Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim adalah kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat

teknokratis, tetapi juga politis dan strategis. RUU tersebut akan menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola iklim nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis hak.

DPD RI perlu menempatkan isu ini dalam skala prioritas tinggi dan mendorong percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim melalui komunikasi



aktif dengan DPR dan Pemerintah. Keterlibatan DPD RI tidak hanya penting sebagai kekuatan penyeimbang, tetapi juga memastikan bahwa suara dan kebutuhan daerah menjadi bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim perlu segera diwujudkan agar pemerintah memiliki dasar hukum untuk menegosiasikan kepentingan nasional dalam forum internasional serta menjamin bahwa kontribusi nasional terhadap agenda iklim global tidak melupakan keadilan sosial, kelestarian ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan di daerah. (\*)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

# **HARI KEBANGKITAN NASIONAL**

20 Mei 2025



## **MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI**

